

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Sekretariat Jenderal

LAPORAN

KINERJA

20

22

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh....
Salam sejahtera bagi kita semua....

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Setjen Wantannas tahun 2022. Diharapkan laporan kinerja Setjen Wantannas ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan 2022 serta memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Setjen Wantannas selama tahun 2022.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan di tahun mendatang. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan kinerja Setjen Wantannas tahun 2022.

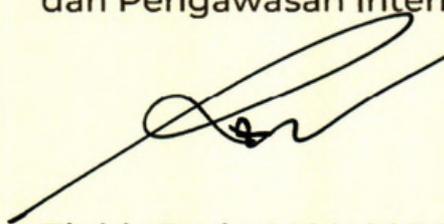
Jakarta, Februari 2023
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla
Laksamana Madya TNI

PERNYATAAN UNTUK DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi,
dan Pengawasan Internal



Elphis Rudy, M.M., M.S.S.
Brigadir Jenderal TNI

IKHTISAR EKSEKUTIF

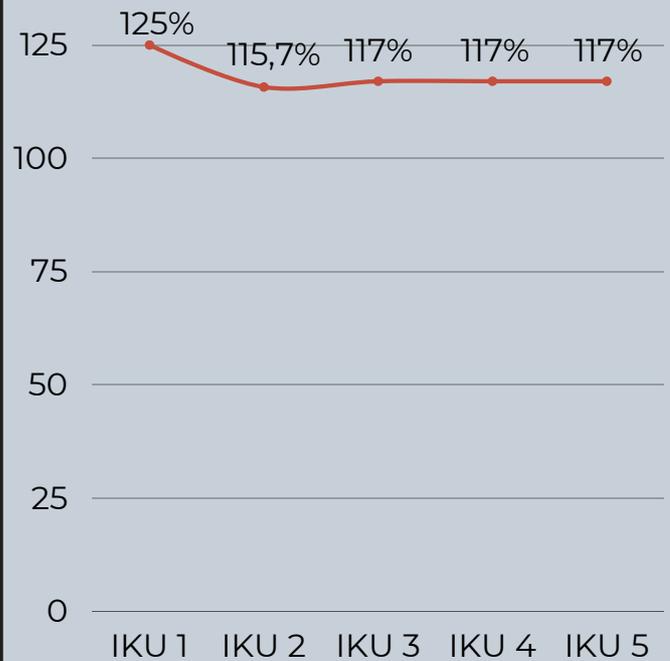


Laporan Kinerja Setjen Wantannas tahun 2022 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dicapai oleh Setjen Wantannas tahun 2022 yang didasarkan atas Rencana Strategis Wantannas Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja Setjen Wantannas terdiri dari:

3 Tujuan **2** Sasaran Strategis **9** Indikator SS

Capaian kinerja atas indikator kinerja utama tahun ketiga (Tahun 2022) periode Renstra 2020-2024 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi di Setjen Wantannas. Ukuran tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

CAPAIAN SS1



CAPAIAN SS2



DAFTAR ISI

• KATA PENGANTAR	2
• IKHTISAR EKSEKUTIF	4
• DAFTAR ISI	5
• BAB I PENDAHULUAN	7
• BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
• BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
• BAB IV PENUTUP	48

LAMPIRAN





Kejahatan akan menang bila
orang yang benar tidak
melakukan apa-apa
- JENDERAL SUDIRMAN

BAB I

PENDAHULUAN





Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dibentuk pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional.



TUGAS

Dewan Ketahanan Nasional

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

FUNGSI



Wantannas

01

Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia

02

Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara

03

Penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan

Setjen Wantannas

Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional

Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara

Penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen Wantannas telah berkontribusi dalam berbagai jenis rekomendasi kebijakan ke Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Setjen Wantannas berupa:

- **Kajian Dinamis**

Suatu telaahan strategis yang diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

- **Kajian Siklis**

Suatu telaahan strategis yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang. Dalam hal ini kajian siklis dalam bentuk:

1. **Kistranas** (Perkiraan Strategis Nasional): Perkiraan kondisi kehidupan nasional pada satu tahun berikutnya dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan;
2. **Apstranas** (Apresiasi Strategis Nasional): Telaahan tentang prioritas sasaran, arah kebijakn dan perkiraan risiko pembangunan pada satu tahun berikut, termasuk antisipasi mengurangi derajat risiko disusun berdasarkan isu strategis global, regional dan nasional;
3. **Telstranas** (Telaahan Strategis Nasional): Telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada lima tahun ke depan, serta pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu strategis yang perlu diperhatikan;
4. **Stranas** (Strategis Nasional): Telaahan tentang kecenderungan lingkungan strategis, peluang dan kendala, prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada lima tahun yang akan datang; dan
5. **Renkonnas** (Rencana Kontijensi Nasional): Telaahan tentang rencana kontijensi menghadapi risiko pembangunan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara.

- **Kajian Kerjasama Dalam Negeri**

Kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparaturnya, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah.

- **Round Table Discussion**

Diskusi yang dipandu oleh moderator dalam rangka mengeksplorasi topik terkait stabilitas keamanan nasional dan menghasilkan rekomendasi.

- **Forum Group Discussion**

Kelompok diskusi terarah dengan peserta berjumlah 8-12 orang dan dipimpin oleh moderator yang bertujuan untuk menyamakan persepsi atas topik atau isu terkait stabilitas keamanan nasional.

ISU-ISU STRATEGIS



Terdapat 4 (empat) isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Setjen Wantannas yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa mendatang, yaitu:

- Sudah tidak relevannya Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas;
- Belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional;
- Belum terealisasinya pelaksanaan Sidang Dewan; dan
- Belum optimalnya manajemen kinerja.



Terdapat 5 (lima) permasalahan utama yang dihadapi Setjen Wantannas, yaitu:

- Belum optimalnya pelaksanaan Keputusan Presiden No.101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional;
- Belum idealnya struktur organisasi di kedeputan dan kebiroan;
- Belum adanya Inspektorat Setjen Wantannas;
- Terbatasnya anggaran; dan
- Belum optimalnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Setjen Wantannas.

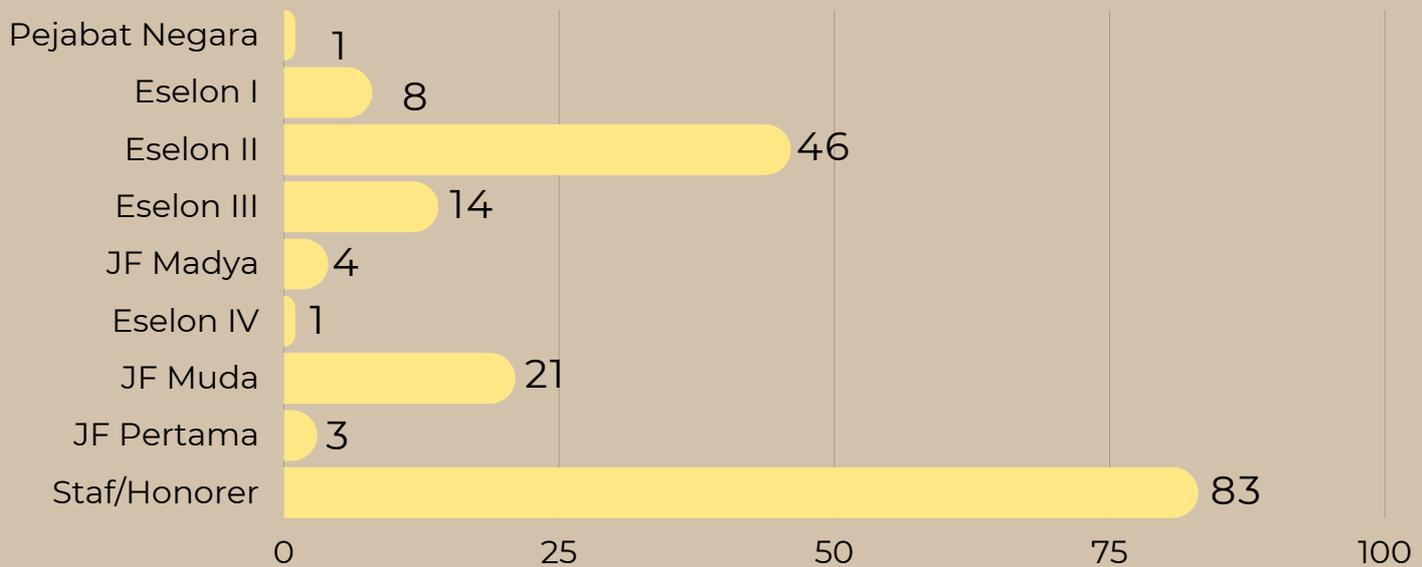
PERMASALAHAN



SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Setjen Wantannas memiliki pegawai sebanyak 181 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan Pendidikan





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



VISI

Dewan Ketahanan Nasional yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong



1

Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara.

2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

TUJUAN WANTANNAS

- Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien; dan
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.



SETJEN WANTANNAS

SS1: Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

1

Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan sidang dewan

2

Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti

3

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan

4

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan

5

Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan

SS2: TERWUJUDNYA PELAYANAN WANTANNAS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2022, Setjen Wantannas merencanakan Prioritas Nasional dengan rincian sebagai berikut:

PN

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PP1

Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Mentalitas Bangsa yg Maju, Modern, dan Berkarakter

KP

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

PP

Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Nilai-Nilai Kebangsaan dan Bela Negara



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan adalah hasil dari proses pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan visi-misi Wantannas. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja sebagai berikut :



0%-29,99%

Tidak Berhasil

30%-69,99%

Kurang Berhasil

70%-79,99%

Cukup Berhasil

80%-100%

Berhasil

>100%

Sangat Berhasil



SASARAN STRATEGIS #1

Terbinanya Kondisi Ketahanan Nasional yang Tangguh dan Dinamis dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



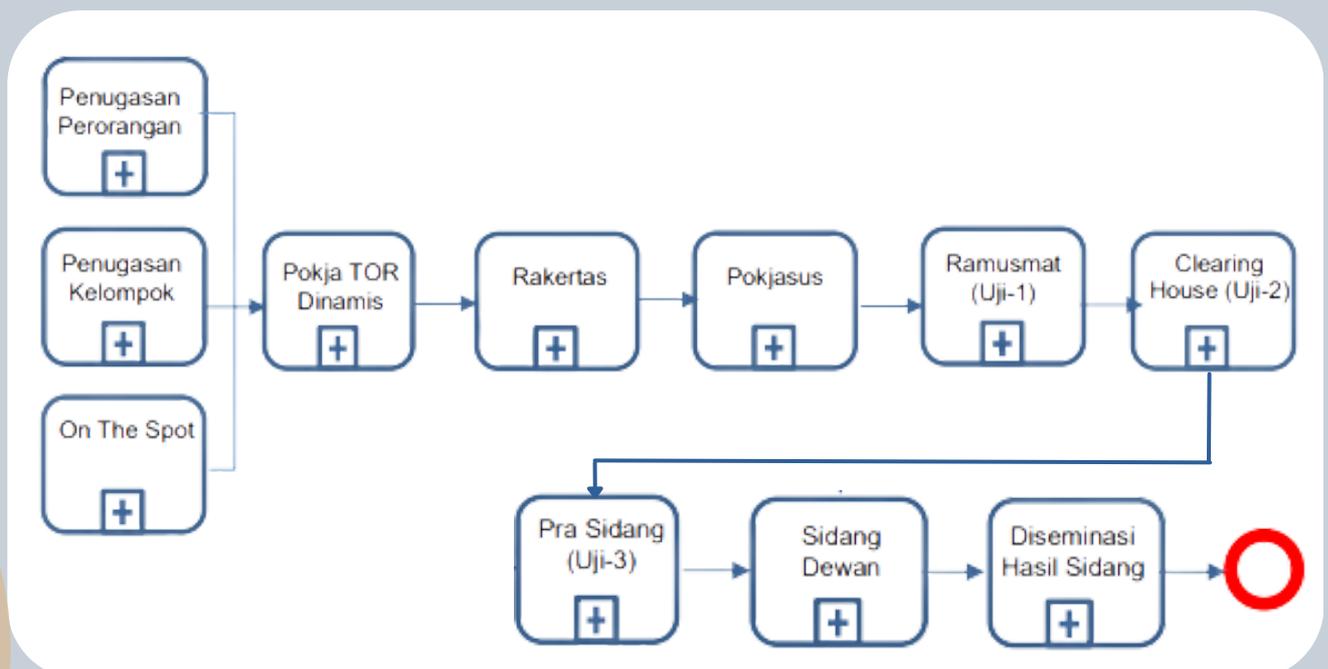
INDIKATOR KINERJA: 1

Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan ketahanan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Di mana pembahasan dan penetapannya dilaksanakan melalui tahapan Uji *Clearing House* dan pelaksanaan sidang dan pascasidang. Uji *Clearing House* terdiri dari 3 (tiga) tahap:

- Rapat Uji Materi Forum I : dipimpin oleh Deputi, dihadiri oleh Deputi lainnya, Kapokja, dan Sekretaris Pokja. Berfokus kepada redaksional. Menghasilkan Naskah ke-1 (N-1);
- Rapat Uji Materi Forum II : menyajikan N-1 kepada Sesjen Wantannas untuk mendapat tanggapan. Menghasilkan Naskah ke-2 (N-2); dan
- Rapat Uji Materi Forum III : menghadirkan pejabat eselon I perwakilan Kementerian/LPNK untuk mendapat tanggapan terkait dengan substansi telaahan. Menghasilkan Naskah ke-3 (N-3).

Di bawah ini merupakan proses bisnis penyiapan Naskah Sidang Dewan:



Adapun formula perhitungan kinerja untuk indikator ini adalah rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasidang dibagi N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasidang dikalikan seratus persen.

$$PRD = \frac{\sum N-3}{\sum RN-3} \times 100 \%$$

Keterangan:

- **PRD** : Persentase Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional (atas petunjuk Ketua Dewan).
- **N-3** : Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasidang.
- **RN-3** : Naskah N-2 yang disetujui sebagai bahan Uji Materi Prasidang.

Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan, sebagai berikut:

$$PRD = \frac{\sum N - 3}{\sum RN - 3} \times 100\%$$

$$PRD = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$PRD = 100\%$$

Ketercapaian atas indikator "*persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan*" disebabkan adanya evaluasi dan komitmen Setjen Wantannas dalam menyiapkan bahan prasidang dewan. Seluruh rekomendasi kebijakan telah dimanfaatkan sebagai rekomendasi kepada Presiden untuk dijadikan bahan Sidang Dewan.



Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 125% atau kategori **Sangat Berhasil**. Indikator ini dicapai dari 2 komponen yaitu Rumusan Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional N-3 yang akan dihasilkan Sesjen setelah Uji Materi Forum Prasadang dan Naskah N-2 yang dijadikan bahan Uji Materi Prasadang.

Berikut disajikan realisasi kinerja sampai dengan TA 2022 dibandingkan dengan target Renstra Setjen Wantannas 2020-2024.

TARGET	TAHUN	REALISASI	Persentase Capaian Kinerja Renstra Tahun Ketiga Setjen Wantannas
-	2020	-	
80%	2021	100%	
80%	2022	100%	
80%	2023	-	
80%	2024	-	



Pada tahun 2022, Setjen Wantannas telah melaksanakan Prasadang Dewan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Naskah	Judul
26 Juli 2022		Sinergi metode penghapusan kemiskinan ekstrem antar K/L dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasional
	Dinamis	Penguatan demokrasi pancasila guna menjaga persatuan dan kesatuan dalam pemilu dan pilkada serentak 2024 dalam rangka keamanan nasional
		Akselerasi pengembangan ekonomi sirkular guna mendukung pemulihan ekonomi dan pengurangan utang negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional
	Saran Tindak	Pencegahan food loss and waste (FLW) guna memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka keamanan nasional
18 Oktober 2022	Dinamis	Solusi terstruktur internasionalisasi masalah papua dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional
	Saran Tindak	Percepatan talenta digital (digital talent) untuk mensukseskan proses transformasi digital nasional dalam rangka keamanan nasional
		Optimalisasi industri strategis pertahanan guna mewujudkan kemandirian dalam rangka memperkuat pertahanan keamanan nasional
	KKDN	Optimalisasi sistem resi gudang (SRG) sebagai aset keuangan petani dan UKM untuk meningkatkan value komoditi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional
22 November 2022	Dinamis	Solusi memperkuat institusi POLRI menuju POLRI yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (presisi) guna meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka ketahanan nasional
	KKDN	Revitalisasi pengembangan energi panas bumi guna mendukung ketahanan energi dan kelestarian alam dalam rangka keamanan nasional
		Optimalisasi program tol laut terhadap penurunan disparitas harga guna mencegah impor ilegal dalam rangka keamanan nasional

INDIKATOR KINERJA: 2

Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti

Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Kajian Kerjasama
- Perkiraan Cepat
- *Round Table Discussion*
- *Forum General Discussion*
- Telaahan Staf

Formula Perhitungan Kinerja:

$$\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$$



Keterangan:

PSTP : Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden

RSTS : Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedeputan yang dikirim ke Presiden

STS : Jumlah saran tindak yang dihasilkan

Pada tahun 2022, saran tindak yang ditargetkan Setjen Wantannas berjumlah 54 rumusan saran tindak yang dilaksanakan oleh 4 Unit Kerja Deputi dan Staf Ahli dengan realisasi rumusan saran tindak sebesar 88,89%. Dengan rincian sebagai berikut:



Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
Kajian Kerjasama	14	14	12	11
RTD/FGD	29	30	25	20
Telaahan Staf	11	11	11	-
Total	54	55	48	31

Persentase saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti, sebagai berikut:

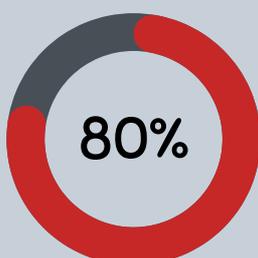
$$PSTP = \frac{\sum RSTS}{\sum STS} \times 100\%$$

$$PRD = \frac{48}{54} \times 100\%$$

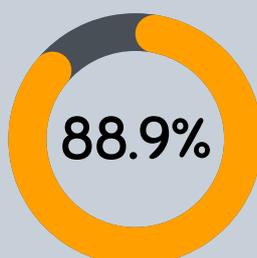
$$PRD = 88,89\%$$

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator ini adalah sebesar 88.89% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 111.1% atau kategori **Sangat Berhasil**. Dari 54 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk dikirim ke Presiden, telah terlaksana 55 rumusan saran tindak atau 101.8%. Sebanyak 48 RK telah dikirim ke Presiden dan 31 RK mendapat respon berupa disposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Adapun 7 RK yang tidak dikirim, dijadikan sebagai bahan pertimbangan internal Setjen Wantannas.

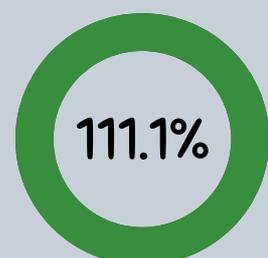
TARGET



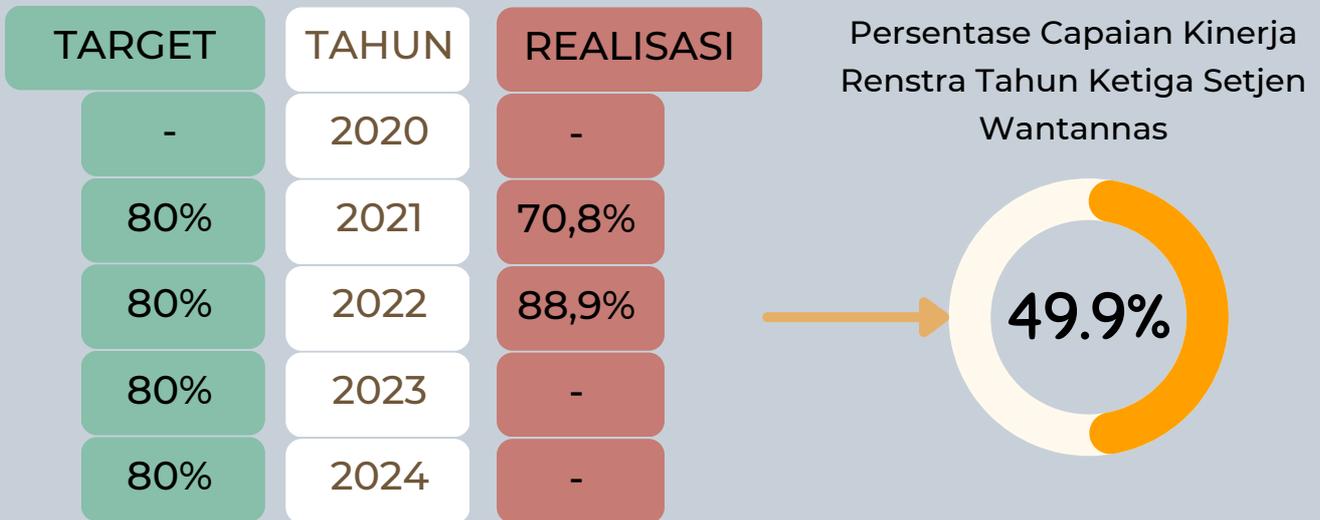
REALISASI



PERSENTASE CAPAIAN



Berikut disajikan realisasi kinerja sampai dengan TA 2022 dibandingkan dengan target Renstra Setjen Wantannas 2020-2024.



INDIKATOR KINERJA: 3

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran pembangunan nasional dilaksanakan melalui saran tindak. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Perkiraan cepat;
- *Round Table Discussion*; dan
- *Forum General Discussion*.

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

$$\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$$

Keterangan:

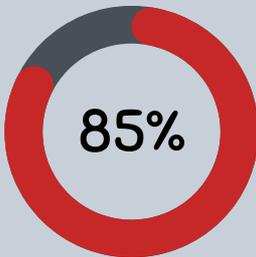
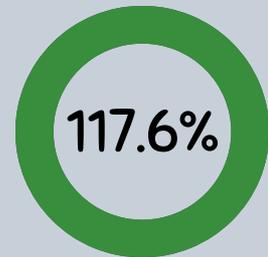
PSTP : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden

RSTS : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional di Kedeputusan yang dikirim ke Presiden

STS : Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dihasilkan

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator "*persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan*" sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 117,65% atau kategori **Sangat Berhasil**. Dari 12 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk dikirim ke Presiden RI, telah terealisasi dengan secara optimal ditandai dengan dikirimnya semua rumusan saran tindak ke Presiden RI serta 10 rumusan saran tindak telah direspon dengan adanya disposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dikarenakan rumusan saran tindak yang dihasilkan berasal dari pemantauan pembangunan nasional yang aktual. Dengan rincian sebagai berikut:

Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
RTD/FGD	12	12	12	10

TARGET**REALISASI****PERSENTASE
CAPAIAN**

Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator ketiga tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:

TARGET	TAHUN	REALISASI
-	2020	-
85%	2021	100%
85%	2022	100%
85%	2023	-
85%	2024	-

Persentase Capaian Kinerja Renstra Tahun Ketiga Setjen Wantannas



INDIKATOR KINERJA: 4

Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan.



Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran kondisi kehidupan nasional. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:

- Perkiraan cepat;
- *Round Table Discussion*; dan
- *Forum General Discussion*.

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

$$PSTK = \frac{\sum RSTK}{\sum STK} \times 100 \%$$

Keterangan:

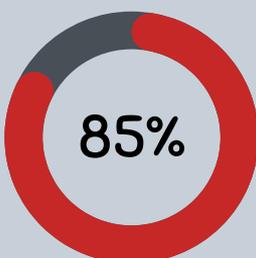
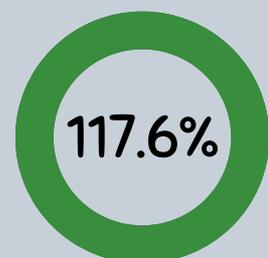
PSTK : Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden

RSTK : Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional di Kedepatian yang dikirim ke Presiden

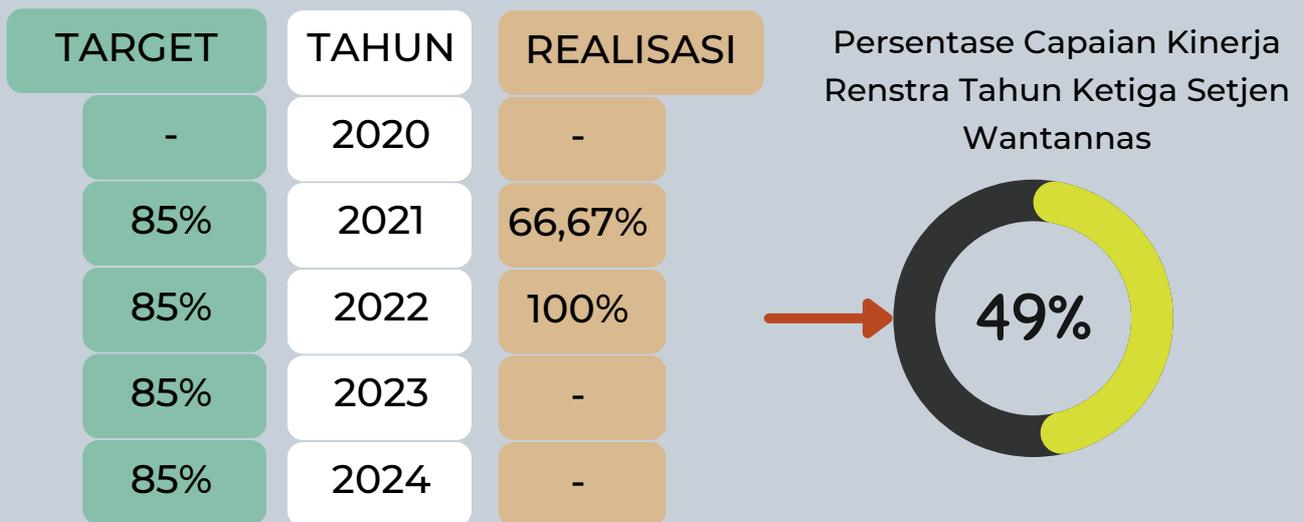
STK : Jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dihasilkan

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2022 berdasarkan indikator "*persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan*" adalah sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 117,6% atau **Sangat Berhasil**. Dari 12 rumusan saran tindak yang ditargetkan untuk dikirim ke Presiden RI, telah terealisasi dengan secara optimal ditandai dengan dikirimnya semua rumusan saran tindak ke Presiden RI serta 10 rumusan saran tindak telah direspon dengan adanya disposisi ke Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dikarenakan rumusan saran tindak yang dihasilkan berasal dari pemantauan kondisi kehidupan nasional yang aktual. Dengan rincian sebagai berikut:

Naskah Saran Tindak	Target	Realisasi	RK Dikirim	RK Direspon
RTD/FGD	12	12	12	10

TARGET**REALISASI****PERSENTASE
CAPAIAN**

Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator keempat tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:



INDIKATOR KINERJA: 5

Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan

Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui:

- Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara
- Sosialisasi

Formula perhitungan kinerja, sebagai berikut:

$$\text{PRKBN} = \frac{\sum \text{RKBN}}{\sum \text{RBN}} \times 100 \%$$

Keterangan:

PRKBN : Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden

RKBN : Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke Presiden

RBN : Jumlah rancangan kebijakan aksi bela negara yang dihasilkan

Bela negara adalah suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara terhadap bangsa dan negara Indonesia menjadi kewajiban suatu kehormatan bagi seluruh warga negara, yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.



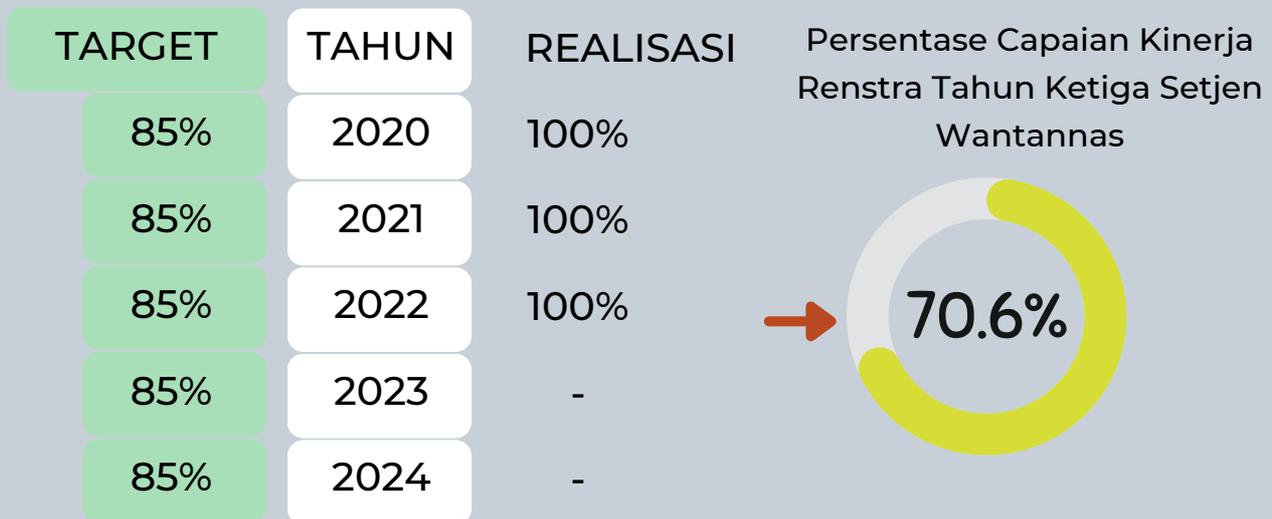
Pada tahun 2022, perumusan kebijakan bidang bela negara telah dilaksanakan berupa rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara, serta sosialisasi yang melibatkan kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dengan menghasilkan 2 rekomendasi kebijakan dan telah dikirim kepada Presiden, dengan judul:

1. Optimalisasi implementasi pembinaan kesadaran bela negara bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah dalam rangka ketahanan nasional; dan
2. Optimalisasi implementasi pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan kampus bagi mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional.

Sejak tahun 2019 sampai 2022, Setjen Wantannas telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait bela negara dengan menghasilkan *output* dan *outcome* dalam rangka mendukung penguatan ketahanan nasional. Sedangkan sejak tahun 2020, bela negara Setjen Wantannas masuk dalam **Prioritas Nasional**. Adapun rincian kegiatan bela negara Setjen Wantannas tahun 2019 s.d 2022 sebagai berikut:



Berikut ditampilkan realisasi kinerja indikator kelima tahun 2022 apabila dibandingkan dengan Renstra Setjen Wantannas:



Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator "persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan" ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 85% dengan persentase capaian kinerja 117,6% atau kategori **Sangat Berhasil**. Dari 2 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan untuk dikirim ke Presiden RI, telah terealisasi dengan secara optimal ditandai dengan dikirimnya rumusan saran tindak ke Presiden RI. Hal ini dikarenakan, komitmen dari Setjen Wantannas untuk turut andil dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter melalui revolusi mental dan ideologi Pancasila.





SASARAN STRATEGIS #2

Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien





INDIKATOR KINERJA: 6

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

1. Kelembagaan atau organisasi;
2. Ketatalaksanaan; dan
3. Sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengukuran reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB menggunakan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil. Masing-masing komponen memiliki bobot, adapun komponen pengungkit mencakup:

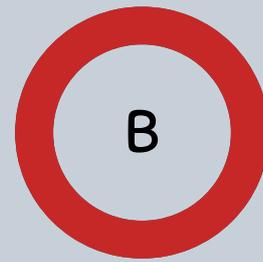
- Manajemen Perubahan;
- Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penataan dan Penguatan Organisasi;
- Penataan Tata Laksana;
- Penataan Sistem Manajemen SDM;
- Penguatan Akuntabilitas;
- Penguatan Pengawasan; dan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi birokrasi yang dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* tentu mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Nilai penerapan RB dalam hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

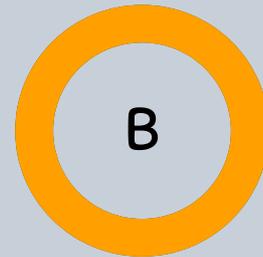
Realisasi kinerja Setjen Wantannas atas indikator indeks RB adalah B dari target B dengan persentase capaian kinerja 100% atau kategori **Berhasil**. Setjen Wantannas dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2021, telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- Melakukan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan ditetapkannya Kepsesjen No.46 Tahun 2021 tentang Program pembentukan peraturan Setjen Wantannas Tahun 2021;
- Telah selesai membangun portal JDIH dan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional;
- Telah melaksanakan pelantikan jabatan fungsional; dan
- Telah menetapkan Persesjen No.86 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Setjen Wantannas.

TARGET



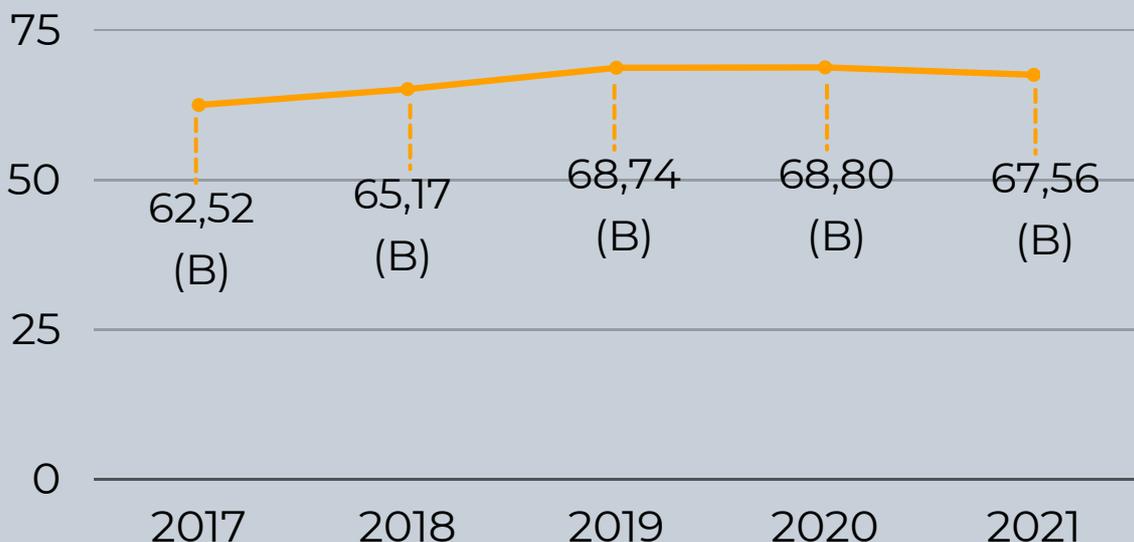
REALISASI



PERSENTASE CAPAIAN



Secara umum, indeks RB Setjen Wantannas terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Adapun, pada tahun 2021 indeks reformasi birokrasi mengalami penurunan. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 sampai dengan 2021:



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu profesionalitas ASN, kualitas pengelolaan anggaran, dan kualitas pengelolaan arsip, serta terdapat beberapa penilaian hasil antara yang baru dilakukan pengukuran pada tahun 2021. Hal ini dapat dirinci dalam tabel hasil antara area perubahan Setjen Wantannas tahun 2021:

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Kualitas pengelolaan aset	0-4	3,46	Kemenkeu
2	Profesionalitas ASN	0-100	52,78	BKN
3	Implementasi SPBE	1-5	2,42	KemenPANRB
4	Kualitas PPBJ	0-100	0,00	LKPP
5	Kualitas PA	0-100	90,82	Kemenkeu
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,42	KemenPANRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	Level 1	BPKP
8	Maturitas SPIP	0-5	Level 3	BPKP
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	58,83	ANRI

Meskipun demikian, hasil penilaian profesionalitas ASN dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa masih dibawah predikat "sangat rendah", serta tingkat kapabilitas APIP belum mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan secara keseluruhan hasil antara Setjen Wantannas pada tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, maka menggunakan data tahun sebelumnya jika tersedia. Disamping itu, masih terdapat beberapa hasil antara yang belum dilakukan pengukuran, yaitu kualitas kebijakan, sistem merit, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.



Berikut ditampilkan pula perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:

TARGET	TAHUN	REALISASI
B	2020	B
B	2021	B
BB	2022	-
BB	2023	-
BB	2024	-

Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

INDIKATOR KINERJA: 7

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- Rencana Strategis;
- Perjanjian Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pengelolaan Data Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Realisasi kinerja Setjen Wantannas TA 2021 berdasarkan indikator nilai SAKIP adalah 65,72 dari target 75 dengan persentase capaian kinerja 87,62% atau kategori **Berhasil**. Kendati dikategorikan berhasil, namun capaian belum optimal dari nilai yang telah ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi rencana aksi masih belum optimal;
2. Perumusan indikator kinerja utama instansi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan;
3. Penjabaran kinerja belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
4. Pengelolaan manajemen kinerja belum terakomodir melalui sistem informasi yang memadai, sehingga pemberian tunjangan belum dapat didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu;
5. Laporan kinerja belum memberikan umpan balik terhadap perbaikan manajemen kinerja tahun berikutnya; dan
6. APIP telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP secara berkala. Namun hasil evaluasi APIP belum memberikan perbaikan yang signifikan terhadap manajemen kinerja instansi dan unit kerja



Berikut ditampilkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2017 sampai dengan 2021 serta perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:



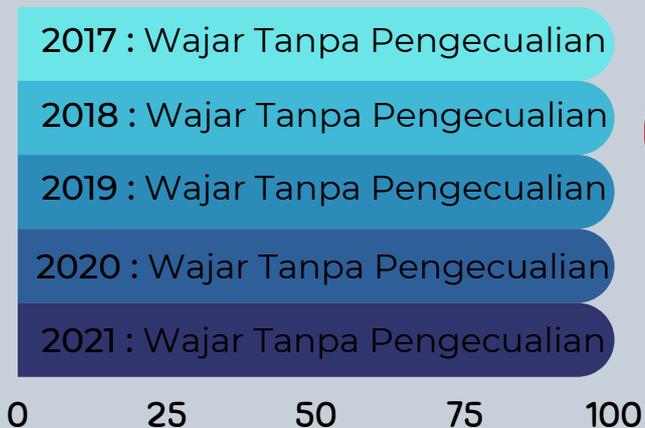
TARGET	TAHUN	REALISASI
70	2020	65,43
75	2021	65,72
80	2022	-
85	2023	-
90	2024	-

Nilai SAKIP Setjen Wantannas Tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

INDIKATOR KINERJA: 8

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Salah satu indikator keberhasilan suatu kementerian/lembaga dalam peningkatan kualitas sumber daya organisasi adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan laporan keuangan Setjen Wantannas tahun 2022 masih berlangsung sehingga belum diketahui hasilnya sampai dengan disahkannya laporan ini. Prestasi Setjen Wantannas sebagai lembaga yang meraih opini WTP selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut yaitu laporan keuangan 2007 sampai dengan 2021.



TARGET



REALISASI



PERSENTASE CAPAIAN



TARGET	TAHUN	REALISASI
WTP	2020	WTP
WTP	2021	WTP
WTP	2022	-
WTP	2023	-
WTP	2024	-

Pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Setjen Wantannas dikarenakan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Penilaian atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas Tahun 2022 masih dalam proses penilaian Tim BPK

INDIKATOR KINERJA: 9

Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan

Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan ketahanan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional.

Tahapan penyelenggaraan sidang dewan:

- Persiapan sidang (Inisiasi dan Uji Materi dalam Forum Deputi/Uji Pertama);
- Forum Sesjen/Uji Kedua;
- Forum Prasadang Dewan/Uji Ketiga; dan
- Pelaksanaan Sidang dan Pascasidang.

Formula Perhitungan Kinerja:

$$JSD = \frac{\sum JSDL}{\sum JSDT} \times 100\%$$

Keterangan:

JSD : Jumlah Sidang Dewan

RSDP : Jumlah Sidang Dewan yang dilaksanakan atau Hasil Prasadang Dewan yang Dikirim ke Presiden

RSDS : Jumlah Sidang Dewan yang ditargetkan

Pada tahun 2022 prasidang Dewan ke-1 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 dengan pokok bahasan “Penyempurnaan Dokumen Strategis untuk Mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional Indonesia”. Rapat Prasidang ini menegaskan kembali bahwa keberadaan Wantannas ini bukan Lembaga operasional tetapi Lembaga yang bersifat strategis untuk membantu Presiden untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis khususnya menanggulangi kemungkinan berbagai hal yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

Pada tanggal 18 Oktober 2022, telah dilaksanakan Prasidang Dewan kedua dengan pokok bahasan:

1. Solusi terstruktur internasionalisasi Masalah Papua dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;
2. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Aset Keuangan Petani dan UKM untuk Meningkatkan Value Komoditi Pertanian dalam Rangka Keamanan Nasional;
3. Percepatan Talenta Digital (Digital Talent) untuk Mensukseskan Proses Transformasi Digital Nasional dalam Rangka Keamanan Nasional; dan
4. Optimalisasi Industri Strategis Pertahanan Guna Mewujudkan Kemandirian dalam Rangka Memperkuat keamanan Nasional.

Setelah dilakukan pembahasan ke empat naskah akademik dan memperhatikan beberapa hal saran dan masukan dari peserta rapat Prasidang, Sesjen Wantannas menekankan bahwa para deputi perumus/pokja naskah akademik agar segera menyempurnakan naskah menjadi naskah strategis sesuai saran masukan dari para peserta rapat Prasidang yang dibahas dalam Prasidang akan dilanjutkan dengan proses pengiriman surat ke Presiden sebagai bahan Sidang Dewan serta selaku Ketua Wantannas.

Pada tanggal 22 November 2022, telah dilaksanakan Prasidang Dewan ketiga dengan pokok bahasan:

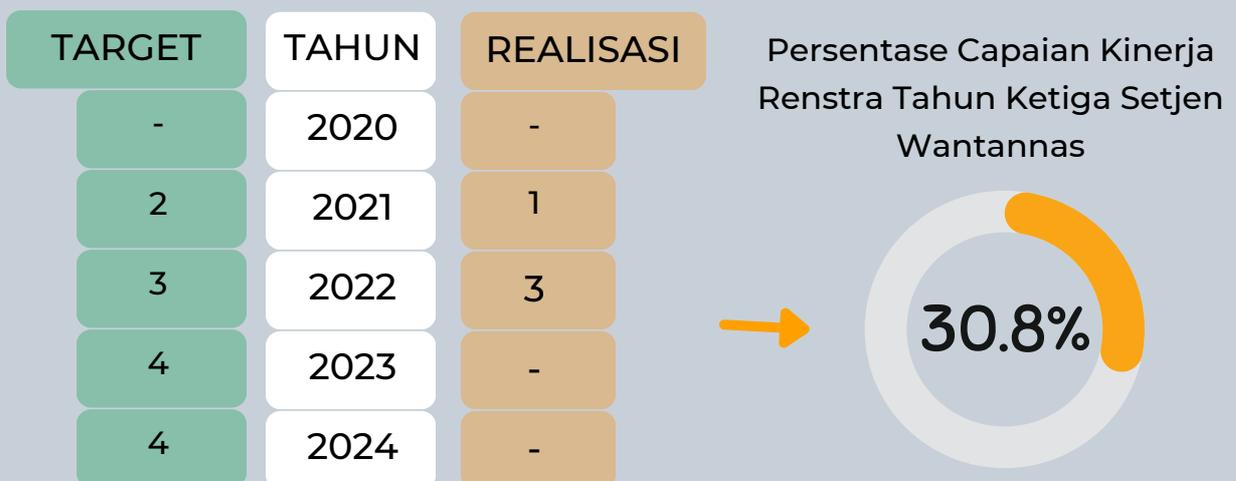
1. Revitalisasi Pengembangan Energi Panas Bumi Guna Mendukung Ketahanan Energi Dan Kelestarian Alam Dalam Rangka Keamanan Nasional;
2. Optimalisasi Program Tol Laut Terhadap Penurunan Disparitas Harga Barang Guna Mencegah Impor Ilegal Dalam Menjaga, Ketahanan Nasional;
3. Solusi Memperkuat Institusi Polri Menuju Polri Yang Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Dalam Rangka Ketahanan Nasional; dan
4. Konsepsi Strategi Maritim Indonesia Guna Mendukung Pembangunan Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Nasional.

Pada tahun 2022, terdapat perbedaan target antara Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Adapun target "*Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan*" dalam Rencana Strategis sebanyak 3 kali Sidang Dewan, sedangkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 2 kali Sidang Dewan. Hal ini dikarenakan adanya keputusan bersama pimpinan di awal tahun 2022 dengan mempertimbangkan kemampuan dari segi anggaran.



Secara substansi Sidang Dewan **belum terlaksana** sampai dengan TA 2022 berakhir. Sebagai komitmen Setjen Wantannas dalam menyelenggarakan sidang dewan, maka Setjen Wantannas telah melaksanakan Prasidang Dewan di tahun 2022 sebanyak 3 kali prasidang. Adapun hasil dari seluruh prasidang dewan telah dilaporkan atau dikirim ke Presiden sebagai Ketua Wantannas, sehingga IKU 9 terkait "*Jumlah Penyelenggaraan Sidang Dewan*" dinilai telah tercapai.

Berikut ditampilkan pula perbandingan dengan Renstra Setjen Wantannas 2020-2024:



Secara keseluruhan dari ke empat naskah prasidang secara garis besar dapat diterima dengan beberapa koreksi dan saran, yang selanjutnya diajukan kepada Presiden RI selaku Ketua Wantannas RI untuk siap dilaksanakan Sidang Dewan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Setjen Wantannas.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Efisiensi
1	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan	Persen	80	100	125,00%	4.884.266.000	4.808.105.258	98,44%	126,98%
2	Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	Persen	80	88,9	111,13%	3.371.426.000	3.238.209.215	96,05%	115,70%
3	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	Persen	85	100	117,65%	241.200.000	240.262.600	99,61%	118,11%
4	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	Persen	85	100	117,65%	241.200.000	240.340.150	99,64%	118,07%
5	Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	Persen	85	100	117,65%	128.700.000	124.709.000	96,90%	121,41%
6	Indeks RB	Indeks	B	B	100,00%	82.750.000	82.746.000	100,00%	100,00%
7	Nilai SAKIP	Nilai	75	65,72	87,63%	81.486.000	81.393.500	99,89%	87,73%
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00%	189.762.000	188.946.511	99,57%	100,43%
9	Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan	Kali	2	3	150,00%	308.000.000	294.930.500	95,76%	156,65%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada.

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase realisasi anggaran yang menunjang indikator-indikator tersebut. Seperti contoh pada IKU 1, realisasi kinerja adalah 100% dari target 80% sehingga persentase capaian target IKU 1 adalah 125%. Adapun realisasi anggaran yang menunjang indikator tersebut, sebanyak Rp4.884.266.000 telah terealisasi dari pagu Rp4.808.105.258 atau dengan kata lain dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,44% untuk mencapai target kinerja tersebut. Artinya tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target IKU 1 adalah 126,98% atau efisiensi.

Dengan cara penghitungan dan perbandingan sebagaimana dipaparkan di paragraf sebelumnya, Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya di Setjen Wantannas adalah efisien karena seluruh target kinerja pada 2022 telah tercapai dengan nilai efisiensi sebesar 116,12% dan realisasi anggaran 98,35%.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/MENGAKIBATKAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pencapaian target kinerja pada 2022 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2022 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Terdapat target kinerja yang masih belum optimal pada tahun 2022, yaitu IKU 7 "Nilai SAKIP" karena:

- Monitoring dan evaluasi rencana aksi masih belum optimal;
- Perumusan indikator kinerja utama instansi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja yang akan diwujudkan;
- Penjabaran kinerja belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;

- Pengelolaan manajemen kinerja belum terakomodir melalui sistem informasi yang memadai, sehingga pemberian tunjangan belum dapat didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu;
- Laporan kinerja belum memberikan umpan balik terhadap perbaikan manajemen kinerja tahun berikutnya; dan
- Hasil evaluasi APIP belum memberikan perbaikan yang signifikan terhadap manajemen kinerja instansi dan unit kerja.

Setjen Wantannas berupaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, dengan cara:

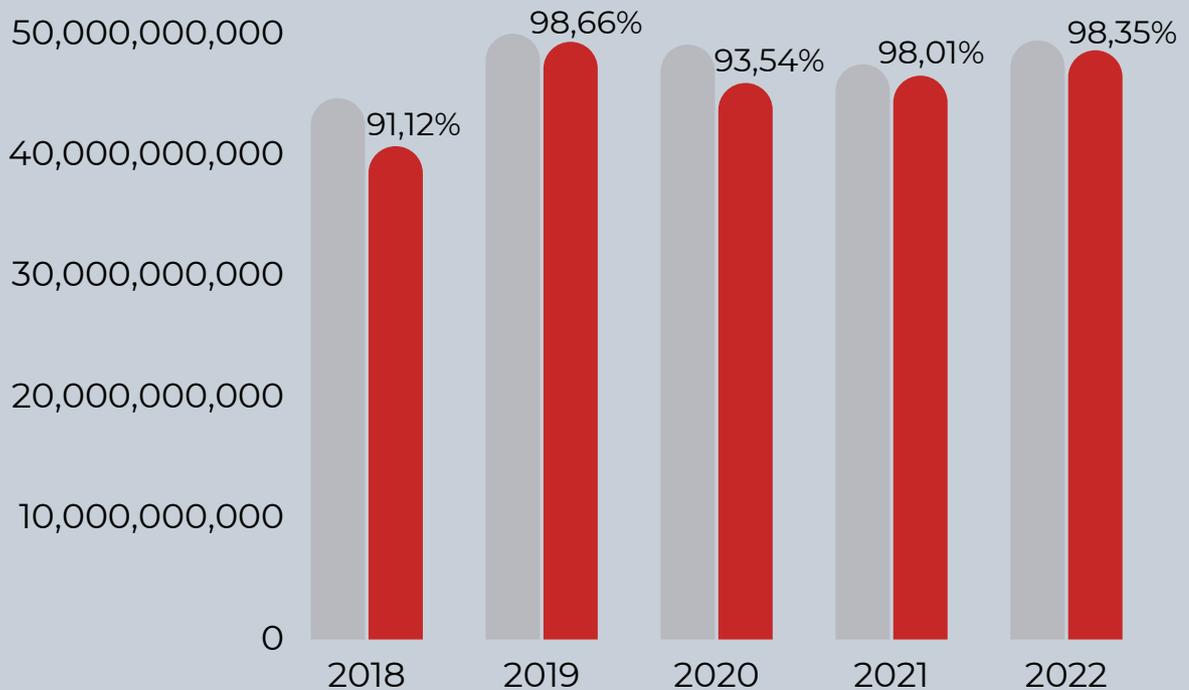
- Mendorong unit kerja sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi, sehingga capaian rencana aksi dapat terpantau;
- Menyempurnakan perumusan indikator kinerja utama instansi sehingga dapat menggambarkan kinerja outcome;
- Menyusun perjenjangan kinerja yang menjelaskan kerangka logis pencapaian kinerja sampai kepada unit kerja terkecil, sehingga terlihat kontribusi kinerja setiap unit yang relevan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang dihadapi organisasi;
- Mendorong pengelolaan manajemen kinerja secara berkala dan berjenjang dari level pimpinan sampai ke individu melalui sistem informasi yang memadai, sehingga dalam pemberian tunjangan dapat didasarkan pada hasil penilaian kinerja individu;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja Setjen Wantannas dengan menyajikan analisa pencapaian kinerja dengan informasi yang memadai, sehingga laporan kinerja yang dibuat dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya; dan
- Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP maupun auditor, sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

2022 Realisasi Anggaran

PAGU ANGGARAN
Rp 49,396,415,000

REALISASI ANGGARAN
Rp 48,582,837,867

PERSENTASE CAPAIAN
98,35%



Keterangan

- Pagu Anggaran
- Realisasi Anggaran

TARGET	TAHUN	REALISASI
44.629.547.000	2018	40.666.844.586
49.950.018.000	2019	49.278.937.866
49.051.252.000	2020	45.884.008.145
47.429.582.000	2021	46.485.176.307
49.396.415.000	2022	48.582.837.867

BAB IV

PENUTUP



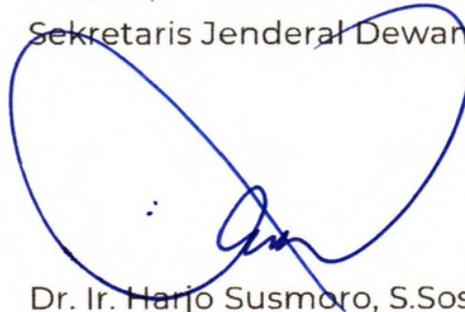
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen Wantannas Tahun 2022 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja Setjen Wantannas. LAKIP Setjen Wantannas menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pada tahun anggaran 2022 serta sebagai acuan strategi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan rencana kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja Setjen Wantannas tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai capaian kinerja dengan kategori Berhasil, dengan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Sasaran, sebagai berikut: 6 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori capaian kinerja Sangat Berhasil, 2 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori capaian Berhasil, serta 1 indikator kinerja utama sasaran dengan kategori capaian Cukup Berhasil.

Akhirnya, Setjen Wantannas mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas dukungan yang diberikan dalam pencapaian kinerja tahun 2022. Setjen Wantannas terus berupaya melakukan perbaikan dalam menjawab tantangan di masa mendatang secara konsisten dan berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2023

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla
Laksamana Madya TNI



LAMPIRAN



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : SP DIPA- 052.01.1.427975/2022**



DS:5202-9078-7008-9213

Revisi ke 07

Tanggal : 05 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 2. Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
- Sebesar : Rp. 49.396.415.000 (EMPAT PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	49.396.415.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA I (018) Rp. 49.396.415.000

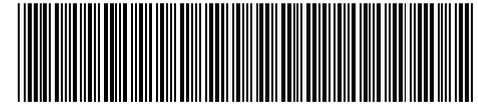
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022

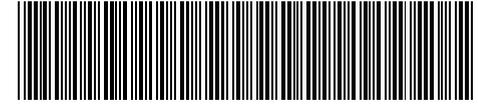


DS:5202-9078-7008-9213

Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

02	PERTAHANAN	Rp.	48.719.072.000
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	Rp.	40.569.823.000
02.04	LITBANG PERTAHANAN	Rp.	8.149.249.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	677.343.000
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	677.343.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022



DS:5202-9078-7008-9213

Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	Rp.	8.826.592.000
AE.5649	Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	Rp.	532.937.000
AE.5653	Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	Rp.	586.009.000
AE.5656	Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	Rp.	469.011.000
AE.5659	Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data	Rp.	417.039.000
AE.5663	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	Rp.	321.223.000
AE.5943	Perumusan Kebijakan Politik Nasional	Rp.	663.353.000
AE.5944	Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional	Rp.	679.384.000
AE.5945	Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi	Rp.	674.584.000
AE.5946	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	Rp.	695.838.000
AE.5947	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	Rp.	677.343.000
AE.5948	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	Rp.	735.043.000
AE.5949	Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Rp.	613.173.000
AE.5950	Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	Rp.	539.295.000
AE.5951	Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	Rp.	666.599.000
AE.5952	Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya	Rp.	555.761.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	40.569.823.000
WA.2874	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Rp.	697.522.000
WA.2875	Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan	Rp.	626.160.000
WA.2876	Pengelolaan Internal Perkantoran	Rp.	39.246.141.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 1

Program	:	052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional			8.826.592.000
Kegiatan	:	5649	Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam			532.937.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan			
		3. 03	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan alam yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5649.ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	5,00	Rekomendasi Kebijakan	532.937.000
Rincian Output	:	01 ABI.001	Kajian Dinamis Bidang Lingkungan Alam	1,00	Rekomendasi Kebijakan	266.787.000
		02 ABI.002	Kajian Saran Tindak Bidang Lingkungan Alam	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		03 ABI.003	Kajian Daerah Bidang Lingkungan Alam	1,00	Rekomendasi Kebijakan	205.850.000
Kegiatan	:	5653	Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial			586.009.000
	:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah Saran Tindak hasil Pemantauan Kondisi Kehidupan Nasional bidang Lingkungan Sosial yang dihasilkan			
		3. 03	Jumlah kajian Kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5653.ABN	Kebijakan Bidang Sosial	6,00	Rekomendasi Kebijakan	586.009.000
Rincian Output	:	01 ABN.001	Kajian Dinamis Bidang Lingkungan Sosial	1,00	Rekomendasi Kebijakan	265.165.000
		02 ABN.002	Kajian Saran Tindak Bidang Lingkungan Sosial	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		03 ABN.003	Kajian Daerah Bidang Lingkungan Sosial	2,00	Rekomendasi Kebijakan	260.544.000
Kegiatan	:	5656	Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara			469.011.000
	:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan			
		3. 03	Jumlah kajian kerja sama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



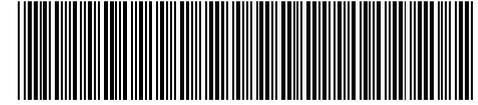
DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	5656.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	469.011.000
Rincian Output		:	01	ABL.001 Kajian Dinamis Bidang Pemerintahan Negara	1,00	Rekomendasi Kebijakan	266.687.000
		:	02	ABL.002 Kajian Saran Tindak Bidang Pemerintahan Negara	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		:	03	ABL.003 Kajian Daerah Bidang Pemerintahan Negara	1,00	Rekomendasi Kebijakan	142.024.000
Kegiatan		:	5659	Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data			417.039.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak hasil pemantauan pantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5659.ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	4,00	Rekomendasi Kebijakan	417.039.000
Rincian Output		:	01	ABO.001 Kajian Dinamis Bidang Informasi dan Pengolahan Data	1,00	Rekomendasi Kebijakan	265.165.000
		:	02	ABO.002 Kajian Saran Tindak Bidang Informasi dan Pengolahan Data	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
		:	03	ABO.003 Kajian Daerah Bidang Informasi dan Pengolahan Data	1,00	Rekomendasi Kebijakan	111.674.000
Kegiatan		:	5663	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu			321.223.000
		:	1. 01	Jumlah telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	5663.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Rincian Output		:	01	ABA.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Ekonomi	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	5663.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Rincian Output		:	01	ABD.001 Naskah Telaahan Staf Bidang Hukum	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	7	:	5663.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	160.423.000
Rincian Output		:	01 ABE.001	Naskah Telaahan Staf Bidang Pertahanan Keamanan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
		:	02 ABE.002	Kajian Daerah Bidang Pertahanan dan Keamanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	120.223.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5663.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Rincian Output		:	01 ABH.001	Naskah Telaahan Staf Bidang IPTEK	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	5663.ABN	Kebijakan Bidang Sosial	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Rincian Output		:	01 ABN.001	Naskah Telaahan Staf Bidang Sosial	2,00	Rekomendasi Kebijakan	40.200.000
Kegiatan		:	5943	Perumusan Kebijakan Politik Nasional			663.353.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional			
Klasifikasi Rincian Output	10	:	5943.ABC	Kebijakan Bidang Politik	5,00	Rekomendasi Kebijakan	663.353.000
Rincian Output		:	01 ABC.001	Kajian Dinamis Bidang Politik Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	429.568.000
		:	02 ABC.002	Kajian Saran Tindak Bidang Politik Nasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	65.535.000
		:	03 ABC.003	Kajian Daerah Bidang Politik Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	168.250.000
Kegiatan		:	5944	Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional			679.384.000
		:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	11	:	5944.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	679.384.000
Rincian Output		:	01	ABE.001 Kajian Siklis Bidang Strategi Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	429.568.000
		:	02	ABE.002 Kajian Deteksi Dini Bidang Strategi Nasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	65.535.000
		:	03	ABE.003 Kajian Daerah Bidang Strategi Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	184.281.000
Kegiatan		:	5945	Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi			674.584.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	12	:	5945.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	674.584.000
Rincian Output		:	01	ABE.001 Kajian Siklis Bidang Rencana Kontijensi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	433.485.000
		:	02	ABE.002 Kajian Saran Tindak Bidang Rencana Kontijensi	4,00	Rekomendasi Kebijakan	90.535.000
		:	03	ABE.003 Kajian Daerah Bidang Rencana Kontijensi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	150.564.000
Kegiatan		:	5946	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional			695.838.000
		:	1. 01	Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah Kajian kerjasama bidang Lingkungan Strategis Nasional			
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5946.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	695.838.000
Rincian Output		:	01	ABE.001 Kajian Siklis Kirstranas, Telstranas dan Apstranas Lingkungan Strategi Nasional	2,00	Rekomendasi Kebijakan	477.904.000
		:	02	ABE.002 Kajian Saran Tindak Bidang Lingkungan Strategi Nasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	61.515.000
		:	03	ABE.003 Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Nasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	156.419.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



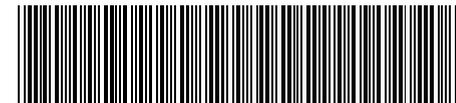
DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 5

Kegiatan	:	5947	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional			677.343.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan			
		3. 03	Jumlah Kajian kerjasama bidang Lingkungan Strategis Regional yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output 14	:	5947.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	677.343.000
Rincian Output	:	01 ABE.001	Kajian Siklis Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas Lingkungan Strategi Regional	2,00	Rekomendasi Kebijakan	482.484.000
		02 ABE.002	Kajian Saran Tindak Bidang Lingkungan Strategi Regional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	61.515.000
		03 ABE.003	Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Regional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	133.344.000
Kegiatan	:	5948	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional			735.043.000
	:	1. 01	Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan			
		3. 03	Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional			
Klasifikasi Rincian Output 15	:	5948.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	735.043.000
Rincian Output	:	01 ABE.001	Kajian Siklis Kirstranas, Telstranas dan Apstranas Lingkungan Strategi Internasional	2,00	Rekomendasi Kebijakan	478.201.000
		02 ABE.002	Kajian Saran Tindak Bidang Lingkungan Strategi Internasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	61.515.000
		03 ABE.003	Kajian Daerah Bidang Lingkungan Strategi Internasional	1,00	Rekomendasi Kebijakan	195.327.000
Kegiatan	:	5949	Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan			613.173.000
	:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan			
		2. 02	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan			
		3. 03	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan			
		4. 04	Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	16	:	5949.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	8,00	Rekomendasi Kebijakan	613.173.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Kajian Dinamis Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	272.313.000
		02	ABD.002	Kajian Saran Tindak Terkait Pengukuran dan Pemecahan Masalah Penyimpangan Pembangunan Nasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		03	ABD.003	Kajian Saran Tindak Terkait Pengukuran Kondisi Kehidupan Nasional	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		04	ABD.004	Kajian Daerah Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	220.260.000
Kegiatan	:	5950		Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi			539.295.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan			
		2. 02		Jumlah Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan			
		3. 03		Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan			
		4. 04		Jumlah kajian kerjasama bidang ekonomi yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	17	:	5950.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8,00	Rekomendasi Kebijakan	539.295.000
Rincian Output	:	01	ABA.001	Kajian Dinamis Bidang Ekonomi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	272.313.000
		02	ABA.002	Kajian Saran Tindak terkait Pengukuran dan Pemecahan Masalah Penyimpangan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		03	ABA.003	Kajian Saran Tindak terkait Pengukuran Kehidupan Nasional Bidang Ekonomi	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		04	ABA.004	Kajian Daerah Bidang Ekonomi	1,00	Rekomendasi Kebijakan	146.382.000
Kegiatan	:	5951		Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan			666.599.000
	:	1. 01		Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan			
		2. 01		Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara			
		3. 02		Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan			
		4. 03		Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan			
		5. 04		Jumlah kajian Kerjasama bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

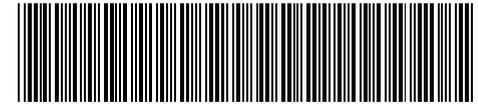
Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 7

Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan

Klasifikasi Rincian Output	18	:	5951.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	8,00	Rekomendasi Kebijakan	537.899.000
Rincian Output		:	01	ABE.001 Kajian Dinamis Bidang Pertahanan dan Keamanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	272.313.000
		:	02	ABE.002 Kajian Saran Tindak Pengukuran dan Pemecahan Masalah Penyimpangan Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		:	03	ABE.003 Kajian Saran Tindak Terkait Kehidupan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		:	04	ABE.004 Kajian Daerah Bidang Pertahanan Keamanan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	144.986.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	5951.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2,00	Rekomendasi Kebijakan	128.700.000
Rincian Output		:	01	PBH.001 Bela Negara (PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	128.700.000
Kegiatan		:	5952	Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya			555.761.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah rancangan kebijakan bidang Sosial dan Budaya yang dihasilkan			
		:	2. 02	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan			
		:	3. 03	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan			
		:	4. 04	Jumlah kajian kerjasama aspek sosial budaya yang dihasilkan			
Klasifikasi Rincian Output	20	:	5952.ABN	Kebijakan Bidang Sosial	8,00	Rekomendasi Kebijakan	555.761.000
Rincian Output		:	01	ABN.001 Kajian Dinamis Bidang Sosial Budaya	1,00	Rekomendasi Kebijakan	272.313.000
		:	02	ABN.002 Kajian Saran Tindak pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional Bidang Sosial Budaya	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		:	03	ABN.003 Kajian Saran Tindak pengukuran kehidupan nasional Bidang Sosial Budaya	3,00	Rekomendasi Kebijakan	60.300.000
		:	04	ABN.004 Kajian Daerah Bidang Sosial Budaya	1,00	Rekomendasi Kebijakan	162.848.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

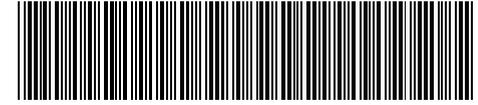
Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Kebijakan Bidang Sosial

Rekomendasi Kebijakan

Program	:	052.01.WA	Program Dukungan Manajemen			40.569.823.000
Kegiatan	:	2874	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan			697.522.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Penerapan RB Wantannas			
		2. 01	Persentase Dokumen Perencanaan yang di hasilkan di Setjen Wantannas			
		3. 01	Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas			
		4. 02	Persentase Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana			
		5. 02	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2874.AAD Peraturan Presiden	1,00	PerPres	30.000.000
Rincian Output	:	01	AAD.001 Rancangan Perpres Dewan Keamanan Nasional	1,00	PerPres	30.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2874.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan	229.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	229.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2874.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen	438.522.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,00	Dokumen	158.760.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	90.000.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	189.762.000
Kegiatan	:	2875	Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan			626.160.000
	:	1. 01	Keamanan Informasi (KAMI) K/L			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

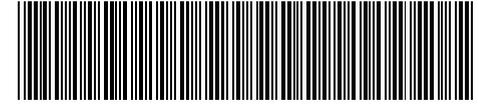
Halaman : I A. 9

Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan

- 2. 01 Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)
- 3. 01 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
- 4. 02 Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana
- 5. 02 Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Klasifikasi Rincian Output	4	:	2875.BLB	Persidangan Lembaga Eksekutif	2,00	sidang	308.000.000	
Rincian Output	:	01	BLB.001	Sidang Dewan	2.00	sidang	308.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2875.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan	108.378.000	
Rincian Output	:	01	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Peringkat	58.378.000	
			02	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2875.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen	209.782.000	
Rincian Output	:	01	EBD.965	Layanan Audit Internal	5.00	Dokumen	209.782.000	
Kegiatan	:	2876		Pengelolaan Internal Perkantoran			39.246.141.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01		Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas				
		2. 01		Persentase pelaksanaan layanan hukum yang Handal dan berkualitas				
		3. 01		Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel				
		4. 01		Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas				
		5. 01		Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien				
		6. 01		Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas				
		7. 02		Indeks Hasil Pengawasan Arsip				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : I A. 10

Pengelolaan Internal Perkantoran

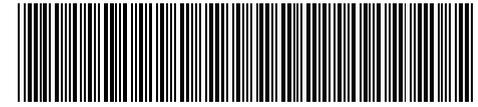
- 8. 02 Indeks Profesionalitas ASN
- 9. 02 Kategori kualitas pengelolaan BMN
- 10. 02 Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu

Klasifikasi Rincian Output	7	:	2876.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan	36.215.237.000
Rincian Output		:	01 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	35.600.000
		:	02 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	52.000.000
		:	03 EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	20.000.000
		:	04 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	19.538.000
		:	05 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	36.088.099.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	2876.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	45,00		2.446.466.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	45,00	Unit	2.446.466.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	2876.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	35,00	Orang	495.238.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	35,00	Orang	495.238.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	2876.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen	89.200.000
Rincian Output		:	01 EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	89.200.000

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
I B. SUMBER DANA**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	49.396.415.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	49.396.415.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427975	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	24.325.722	22.594.227	2.476.466	-	-	49.396.415		
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	-	8.826.592	-	-	-	8.826.592		
5649	Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	-	532.937	-	-	-	532.937		
5649.ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	532.937	-	-	-	532.937	01 . 51	
01	RM	-	532.937	-	-	-	532.937	018	
5653	Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	-	586.009	-	-	-	586.009		
5653.ABN	Kebijakan Bidang Sosial (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	586.009	-	-	-	586.009	01 . 51	
01	RM	-	586.009	-	-	-	586.009	018	
5656	Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	-	469.011	-	-	-	469.011		
5656.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	469.011	-	-	-	469.011	01 . 51	
01	RM	-	469.011	-	-	-	469.011	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5659	Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data	-	417.039	-	-	-	417.039		
5659.ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	417.039	-	-	-	417.039	01 . 51	
01	RM	-	417.039	-	-	-	417.039	018	
5663	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian	-	321.223	-	-	-	321.223		
5663.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	40.200	-	-	-	40.200	01 . 51	
01	RM	-	40.200	-	-	-	40.200	018	
5663.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	40.200	-	-	-	40.200	01 . 51	
01	RM	-	40.200	-	-	-	40.200	018	
5663.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	160.423	-	-	-	160.423	01 . 51	
01	RM	-	160.423	-	-	-	160.423	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5663.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	40.200	-	-	-	40.200	01 . 51	
01	RM	-	40.200	-	-	-	40.200	018	
5663.ABN	Kebijakan Bidang Sosial (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	40.200	-	-	-	40.200	01 . 51	
01	RM	-	40.200	-	-	-	40.200	018	
5943	Perumusan Kebijakan Politik Nasional	-	663.353	-	-	-	663.353		
5943.ABC	Kebijakan Bidang Politik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	663.353	-	-	-	663.353	01 . 51	
01	RM	-	663.353	-	-	-	663.353	018	
5944	Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional	-	679.384	-	-	-	679.384		
5944.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	679.384	-	-	-	679.384	01 . 51	
01	RM	-	679.384	-	-	-	679.384	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5945	Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi	-	674.584	-	-	-	674.584		
5945.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	674.584	-	-	-	674.584	01 . 51	
01	RM	-	674.584	-	-	-	674.584	018	
5946	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	-	695.838	-	-	-	695.838		
5946.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	695.838	-	-	-	695.838	01 . 51	
01	RM	-	695.838	-	-	-	695.838	018	
5947	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	-	677.343	-	-	-	677.343		
5947.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	677.343	-	-	-	677.343	01 . 51	
01	RM	-	677.343	-	-	-	677.343	018	
5948	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	-	735.043	-	-	-	735.043		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5948.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	735.043	-	-	-	735.043	01 . 51	
01	RM	-	735.043	-	-	-	735.043	018	
5949	Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	-	613.173	-	-	-	613.173		
5949.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	613.173	-	-	-	613.173	01 . 51	
01	RM	-	613.173	-	-	-	613.173	018	
5950	Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	-	539.295	-	-	-	539.295		
5950.ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	539.295	-	-	-	539.295	01 . 51	
01	RM	-	539.295	-	-	-	539.295	018	
5951	Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	-	666.599	-	-	-	666.599		
5951.ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	537.899	-	-	-	537.899	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	537.899	-	-	-	537.899	018	
5951.PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	128.700	-	-	-	128.700	01 . 51	
01 RM		-	128.700	-	-	-	128.700	018	
5952	Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya	-	555.761	-	-	-	555.761		
5952.ABN	Kebijakan Bidang Sosial (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	555.761	-	-	-	555.761	01 . 51	
01 RM		-	555.761	-	-	-	555.761	018	
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.325.722	13.767.635	2.476.466	-	-	40.569.823		
2874	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	-	697.522	-	-	-	697.522		
2874.AAD	Peraturan Presiden (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	30.000	-	-	-	30.000	01 . 51	
01 RM		-	30.000	-	-	-	30.000	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2874.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	229.000	-	-	-	229.000	01 . 51	
01	RM	-	229.000	-	-	-	229.000	018	
2874.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	438.522	-	-	-	438.522	01 . 51	
01	RM	-	438.522	-	-	-	438.522	018	
2875	Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan	-	596.160	30.000	-	-	626.160		
2875.BLB	Persidangan Lembaga Eksekutif (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	308.000	-	-	-	308.000	01 . 51	
01	RM	-	308.000	-	-	-	308.000	018	
2875.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	108.378	-	-	-	108.378	01 . 51	
01	RM	-	108.378	-	-	-	108.378	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



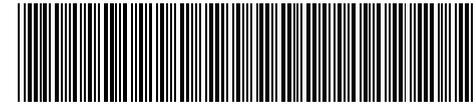
DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2875.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	179.782	30.000	-	-	209.782	01 . 51	
01	RM	-	179.782	30.000	-	-	209.782	018	
2876	Pengelolaan Internal Perkantoran	24.325.722	12.473.953	2.446.466	-	-	39.246.141		
2876.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	24.325.722	11.889.515	-	-	-	36.215.237	01 . 51	
01	RM	24.325.722	11.889.515	-	-	-	36.215.237	018	
2876.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	2.446.466	-	-	2.446.466	01 . 51	
01	RM	-	-	2.446.466	-	-	2.446.466	018	
2876.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	495.238	-	-	-	495.238	01 . 51	
01	RM	-	495.238	-	-	-	495.238	018	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Kewenangan : (KP)

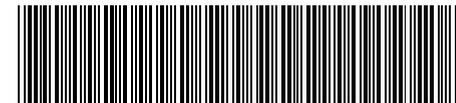
Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2876.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	89.200	-	-	-	89.200	01 . 51	
01 RM		-	89.200	-	-	-	89.200	018	
JUMLAH		24.325.722	22.594.227	2.476.466	-	-	49.396.415		

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Oppla.
Laksamana Madya TNI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	427975	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	806.888	2.320.214	3.686.076	5.777.565	2.746.774	4.783.546	4.291.660	3.520.984	3.771.107	4.108.257	5.747.087	7.836.258	49.396.415
		BELANJA PEGAWAI	538.103	1.753.942	1.683.568	2.768.865	1.658.867	1.820.867	2.923.333	1.829.378	1.846.363	1.832.112	1.933.210	3.737.113	24.325.722
		BELANJA BARANG	268.785	566.273	2.002.508	3.008.700	1.087.907	2.962.678	1.368.326	1.691.605	1.924.744	2.246.230	2.147.685	3.318.785	22.594.227
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.915	1.666.192	780.360	2.476.466
052.01.AE.5649		Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	0	0	132.000	31.590	86.905	26.253	7.800	1.300	163.047	20.084	47.922	16.035	532.937
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	132.000	31.590	86.905	26.253	7.800	1.300	163.047	20.084	47.922	16.035	532.937
052.01.AE.5653		Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	0	0	370	185.320	5.860	59.887	15.050	370	19.730	170.295	58.332	70.795	586.009
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	370	185.320	5.860	59.887	15.050	370	19.730	170.295	58.332	70.795	586.009
052.01.AE.5656		Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	0	0	0	130.388	23.980	180.620	13.749	67.273	15.028	15.550	370	22.054	469.011
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	130.388	23.980	180.620	13.749	67.273	15.028	15.550	370	22.054	469.011
052.01.AE.5659		Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data	0	0	0	360	5.860	199.919	367	65.408	0	118.247	12.000	14.878	417.039
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	360	5.860	199.919	367	65.408	0	118.247	12.000	14.878	417.039
052.01.AE.5663		Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	0	0	0	370	39.830	20.100	125.050	50.550	14.030	46.060	0	25.233	321.223
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	370	39.830	20.100	125.050	50.550	14.030	46.060	0	25.233	321.223

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



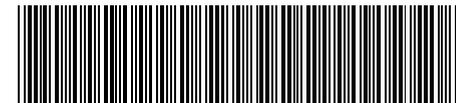
DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
052.01.AE.5943		Perumusan Kebijakan Politik Nasional	0	40.800	262.837	102.938	7.675	0	11.550	127.920	21.793	25.873	21.622	40.345	663.353
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	40.800	262.837	102.938	7.675	0	11.550	127.920	21.793	25.873	21.622	40.345	663.353
052.01.AE.5944		Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional	0	0	0	21.185	370	296.800	62.593	36.000	30.726	181.816	9.790	40.105	679.384
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	21.185	370	296.800	62.593	36.000	30.726	181.816	9.790	40.105	679.384
052.01.AE.5945		Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi	0	0	0	357.070	0	36.000	47.403	0	160.258	11.439	21.780	40.634	674.584
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	357.070	0	36.000	47.403	0	160.258	11.439	21.780	40.634	674.584
052.01.AE.5946		Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	0	0	132.000	219.278	36.000	33.842	0	126.746	27.253	36.171	39.368	45.180	695.838
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	132.000	219.278	36.000	33.842	0	126.746	27.253	36.171	39.368	45.180	695.838
052.01.AE.5947		Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	0	0	132.000	219.387	36.000	8.251	0	21.646	149.764	32.417	25.568	52.310	677.343
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	132.000	219.387	36.000	8.251	0	21.646	149.764	32.417	25.568	52.310	677.343
052.01.AE.5948		Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	0	0	132.000	220.403	36.000	8.336	0	18.431	42.989	56.618	215.365	4.900	735.043
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	132.000	220.403	36.000	8.336	0	18.431	42.989	56.618	215.365	4.900	735.043
052.01.AE.5949		Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	0	0	132.000	121.786	0	55.620	0	0	0	162.256	28.005	113.507	613.173
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	132.000	121.786	0	55.620	0	0	0	162.256	28.005	113.507	613.173
052.01.AE.5950		Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	0	0	0	171.850	98.912	73.573	9.790	35.525	0	80.160	19.976	49.508	539.295

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : (052) DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (427975) SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

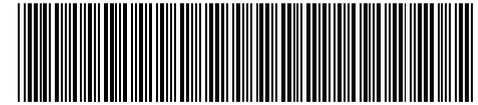
Halaman : III. 3
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	052.01.AE.5951	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	171.850	98.912	73.573	9.790	35.525	0	80.160	19.976	49.508	539.295
		Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	0	0	0	0	0	201.055	15.004	166.506	0	168.451	41.710	73.874	666.599
	052.01.AE.5952	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	201.055	15.004	166.506	0	168.451	41.710	73.874	666.599
		Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya	0	0	0	0	0	214.478	6.230	71.155	143.592	48.267	42.206	29.834	555.761
	052.01.WA.2874	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	214.478	6.230	71.155	143.592	48.267	42.206	29.834	555.761
		Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	0	8.978	4.990	98.199	65.337	19.865	76.379	37.328	36.503	104.804	82.382	162.756	697.522
	052.01.WA.2875	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	8.978	4.990	98.199	65.337	19.865	76.379	37.328	36.503	104.804	82.382	162.756	697.522
		Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan	0	0	1.418	22.490	2.609	33.763	41.601	152.014	16.784	85.294	106.714	163.474	626.160
	052.01.WA.2876	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	1.418	22.490	2.609	33.763	41.601	152.014	16.784	55.380	106.714	163.388	596.160
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.915	0	86	30.000
		Pengelolaan Internal Perkantoran	806.888	2.270.436	2.756.462	3.874.949	2.301.436	3.315.181	3.859.094	2.542.814	2.929.612	2.744.454	4.973.979	6.870.837	39.246.141
		51 BELANJA PEGAWAI	538.103	1.753.942	1.683.568	2.768.865	1.658.867	1.820.867	2.923.333	1.829.378	1.846.363	1.832.112	1.933.210	3.737.113	24.325.722
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	268.785	516.494	1.072.893	1.106.085	642.569	1.494.314	935.760	713.436	1.083.248	912.342	1.374.577	2.353.449	12.473.953
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666.192	780.274	2.446.466

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
IV A. B L O K I R**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : [052] DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : [01] Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [427975] SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

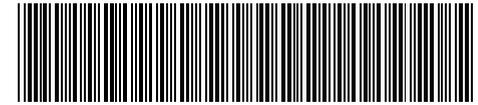
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 052.01.1.427975/2022
IV B. C A T A T A N**



DS:5202-9078-7008-9213

Kementerian Negara/Lembaga : [052] DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Unit Organisasi : [01] Setjen Dewan Ketahanan Nasional
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [427975] SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
427975	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL		
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
2876	Pengelolaan Internal Perkantoran		
2876.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 1.507.499		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin * Pengadaan Kendaraan Bermotor 1 Unit KDJ Pimpinan Lembaga, 1 Unit KDJ Es II, dan 11 Unit KDO Roda 2 Rp. 1.507.499		

Jakarta, 17 November 2021
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ttd.
Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI



**DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL**

**PERJANJIAN KINERJA
DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2022**

Jakarta, 27 Desember 2021



PERJANJIAN KINERJA
DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2022

Jakarta, 21 Desember 2021



**DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIS JENDERAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, ~~27~~ Desember 2021

Dewan Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

Lampiran:
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sesjen Wantannas

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan	80%
		Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	80%
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	85%
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	85%
		Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	85%
2	Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks RB	B
		Nilai SAKIP	80
		Opini BPK	WTP
		Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan	2

Program

1. Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 8.826.592.000.-
Rp. 41.206.166.000.-
Total Rp. 50.032.758.000.-

Jakarta, 21 Desember 2021
Dewan Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DUKUNGAN MANAJEMEN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan yang di hasilkan	5
		Opini BPK atas LK Wantannas	WTP
		Nilai Penerapan RB Wantannas	BB
		Nilai SAKIP	80
2	Terkelolanya Layanan Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	4
		Maturitas SPIP	4
		Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	4
		Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L	5
		Persentase Sidang Dewan yang terlaksana	75%
3	Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan TUP	5
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	2
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	B
		Indeks Profesionalitas ASN	80

Kegiatan

1. Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan
2. Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan
3. Pengelolaan Internal Perkantoran

Anggaran

Rp. 728.040.000.-
Rp. 626.160.000.-
Rp. 39.851.966.000.-
Total Rp. 41.206.166.000.-



Jakarta, 21 Desember 2021
Dewan Ketahanan Nasional RI
Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
Laksamana Madya TNI



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini, Pengawas Internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan . . .

- a. Melakukan reviu atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31** Maret 2020

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



Achmad Djamaludin
ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

- Kementerian/Lembaga : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
- Tugas : Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.
- Fungsi : 1. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
 2. Perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
 3. Penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	
		Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	
		Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	
		Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	
2.	Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
Opini Badan Pemeriksa Keuangan			
Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan			



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

KEDEPUTIAN PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional dan internasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional	Jumlah Kirstranas, Telstranas dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya hasil kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional	Terumuskannya hasil kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara	Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

2. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang pemerintahan negara	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	
3.	Terwujudnya kajian kerjasama bidang pemerintahan negara	Jumlah kajian kerjasama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan alam	Jumlah rancangan kebijakan bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan alam	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan alam	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan alam yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang lingkungan sosial	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang lingkungan sosial	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan sosial	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah kajian kerjasama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
		Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan	
		Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	

Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional	Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan	

2. Terumuskannya . . .

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang politik nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional	

Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang strategi nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi risiko pembangunan nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontinjensi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	

KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden			
Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden			
Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden			
Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan			

Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-undangan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Ekonomi

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan ekonomi	Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang ekonomi	Jumlah kajian kerjasama bidang ekonomi yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan sosial budaya	Jumlah rancangan kebijakan sosial dan budaya yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama aspek sosial budaya	Jumlah kajian kerjasama aspek sosial budaya yang dihasilkan	

Pembantu Deputi Urusan Pertahanan dan Keamanan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	
2.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	
3.	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	
4.	Terumuskannya kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan	Jumlah kajian kerjasama bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	
5.	Penguatan ketahanan nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara	

STAF AHLI

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terumuskannya Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu yang Tangguh dan dinamis	Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	

BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas	
		Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas	Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas	
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan	
4.	Terlaksananya layanan reformasi birokrasi	Nilai penerapan reformasi birokrasi Wantannas	

BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN PENGAWAS INTERNAL

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan persidangan, dan kehumasan	Peringkat keterbukaan informasi publik	
		Jumlah sidang Dewan yang terlaksana	
2.	Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal	Keamanan Informasi (KAMI) K/L	
3.	Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas	Nilai internal Audit Capability Model (IA-CM)	
		Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	

BIRO UMUM

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas	
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	
2.	Terlaksananya layanan manajemen (Barang Milik Negara) BMN yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel	
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	
3.	Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien	
4.	Terlaksananya layanan umum	Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas	
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
5.	Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas	
		Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu	
6.	Terlaksananya Layanan Hukum yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan hukum yang Handal dan berkualitas	



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Sasar Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Perspektif Stakeholder								
SS1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong	1	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	-	80%	80%	80%	80%
		2	Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	-	80%	80%	80%	80%
		3	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	-	85%	85%	85%	85%
		4	Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	-	85%	85%	85%	85%
		5	Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan	-	85%	85%	85%	85%
Perpektif Customer								
SP1	Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	1	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	-	80%	80%	80%	80%
		2	Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden	-	80%	80%	80%	80%
		3	Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	-	85%	85%	85%	85%
SP2	Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang	1	Persentase rancangan kebijakan sistem nasional	-	80%	80%	80%	80%

	tangguh dan dinamis		yang disiapkan untuk bahan prasidang						
		2	Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	-	80%	80%	80%	80%	80%
		3	Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	-	85%	85%	85%	85%	85%
SP3	Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis	1	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	-	80%	80%	80%	80%	80%
		2	Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	-	80%	80%	80%	80%	80%
		3	Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan	-	80%	80%	80%	80%	80%
		4	Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	-	85%	85%	85%	85%	85%
SP4	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	1	Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	-	80%	80%	80%	80%	80%
		2	Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden	-	80%	80%	80%	80%	80%
		3	Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	-	80%	80%	80%	80%	80%
		4	Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan	-	85%	85%	85%	85%	85%

			ketahanan yang dikirim ke Presiden					
		5	Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan	-	85%	85%	85%	85%
SP5	Meningkatnya kehandalan telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis	1	Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	-	85%	85%	85%	85%
Perspektif Learning and growth								
SS2	Terwujudnya Wantannas yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi	-	B	BB	BB	BB
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	75	80	85	90
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP
			Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan	-	2	3	4	4
SP6	Terkelolanya Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi		Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	-	4	4	4	4
			Opini BPK atas LK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai RB Wantannas	-	B	BB	BB	A
			Nilai SAKIP	-	75	80	85	90
SP7	Terkelolanya Layanan persidangan, sistem informasi dan Pengawasan internal yang bersih,		Jumlah layanan yang dihasilkan pada bagian Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	-	4	4	4	4

	akuntabel dan berkinerja tinggi							
			Maturitas SPIP	-	4	4	4	3
			Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	-	5	5	5	5
			Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L	-	5	5	5	4
			Persentase Sidang Dewan yang terlaksana	-	75%	75%	75%	75%
SP8	Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi		Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan TUP	-	5	5	5	5
			Kategori kualitas pengelolaan BMN	-	2	2	2	2
			Indeks Hasil Pengawasan Arsip	-	B	B	B	B
			Indeks Profesionalitas ASN	-	75	80	82	85

MANUAL IKU KEMENTERIAN/LEMBAGA SEKJEN WANTANNAS

PERSPEKTIF: STAKEHOLDER

SS1: Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

Indikator Kinerja Utama	
IKU1. Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional	
Definisi	<p>Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Dimana pembahasan dan penetapannya dilaksanakan melalui Tahapan Uji <i>Clearing House</i> dan pelaksanaan sidang dan pasca sidang. Uji <i>clearing house</i> terdiri dari 3 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Uji Materi Forum I: Dipimpin oleh Deputi, dihadiri Deputi lainnya, Kapokja, Sekretaris Pokja. Berfokus pada redaksional. Menghasilkan Naskah Kesatu (N-1). 2. Rapat Uji Materi Forum II: Menyajikan Naskah Kesatu (N-1) kepada Sesjen Wantannas untuk mendapat tanggapan. Menghasilkan Naskah Kedua (N-2). 3. Rapat Uji Materi Forum III: Menghadirkan pejabat eselon satu perwakilan Kementerian/LPNK untuk mendapat tanggapan terkait dengan substansi telaahan. Menghasilkan Naskah Ketiga (N-3).
Formula perhitungan kinerja	<p>Rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang akan dihasilkan Sesjen setelah uji materi forum prasidang dibagi Naskah N-2 yang di jadikan bahan uji Materi Prasidang dikalikan seratus persen</p> $PRD = \frac{\sum N-3}{\sum RN-3} \times 100 \%$ <p>PRD = Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang dijadikan rumusan kebijakan dan disiapkan untuk bahan Sidang Dewan Ketahanan Nasional (atas petunjuk ketua dewan)</p> <p>N-3 = Rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional (Naskah N-3) yang akan dihasilkan Sesjen setelah uji materi forum prasidang</p>

	RN-3 = Naskah N-2 yang disetujui sebagai bahan uji Materi Prasadang
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal
Penyedia Data	Seluruh Kedepatian
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama

IKU2. Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Kerjasama 2. Perkiraan Cepat 3. Round Table Discussion 4. Forum General Discussion 5. Telaahan Staff
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedepatian yang direspon ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang dikirim ke presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional di Kedepatian yang dikirim ke Presiden STS = Jumlah saran tindak yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Semua Kedepatian dan Staff Ahli
Penyedia Data	Semua Kedepatian dan Staff Ahli
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama	
IKU3. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan	
Definisi	Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran pembangunan nasional dilaksanakan melalui saran tindak. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang direspon Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dihasilkan dikali seratus persen $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p> PSTP = Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden STS = Saran tindak pemantauan/pengukuran pembangunan nasional yang dihasilkan </p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama	
IKU4. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	
Definisi	Rancangan kebijakan dilaksanakan melalui saran tindak pemantauan dan pengukuran kondisi kehidupan nasional. Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang direspon Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTK} = \frac{\sum \text{RSTK}}{\sum \text{STK}} \times 100 \%$ <p>PSTK = Persentase rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTK = Rumusan saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden STK = Saran tindak pemantauan/pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputan Sisnas, Kedeputan Polstra, Kedeputan Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama

IKU5. Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan

Definisi	Perumusan rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah rancangan kebijakan bela negara yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PRKBN} = \frac{\sum \text{RKBN}}{\sum \text{RBN}} \times 100 \%$ <p>PRKBN = Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dikirim ke Presiden RKBN = Jumlah rancangan kebijakan dan strategi aksi bela negara yang dikirim ke Presiden</p>

	RBN = jumlah rancangan kebijakan bela negara yang dihasilkan yang dihasilkan
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

MANUAL IKU ESELON I SEKJEN WANTANNAS

PERSPEKTIF: CUSTOMER

MANUAL IKU DEPUTI PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

SP1: Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional merupakan hasil dari telaahan strategis (siklis dan dinamis) berkaitan dengan permasalahan nasional, regional dan Internasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian siklis adalah suatu telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang, dalam dalam hal ini Deputi Pengkajian dan Penginderaan menyusun kajian siklis dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirstranas (Perkiraan Strategis Nasional): Perkiraan kondisi kehidupan nasional pada satu tahun berikutnya dan pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu-isu strategis yang perlu diperhatikan.• Apstranas (Apresiasi Strategis Nasional): Telaahan tentang prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada satu tahun berikut, termasuk antisipasi mengurangi derajat risiko disusun berdasarkan isu strategis global, regional dan nasional.• Telstranas (Telaahan Strategis Nasional): Telaahan tentang perkiraan kondisi kehidupan nasional pada lima tahun ke depan, serta pengaruhnya terhadap kondisi keamanan nasional serta isu strategis yang perlu diperhatikan. <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional, regional dan internasional (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi forum II dibagi Naskah N-1 (siklis dan dinamis) ke deputian jandra yang di jadikan bahan uji materi forum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional, regional dan internasional (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi forum II RN-2 = Naskah N-1 (siklis dan dinamis) ke deputian jandra yang di jadikan bahan uji materi forum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Indikator Kinerja Utama

IKP2. Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
-----------------	--

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional di Kedeputan Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di kedeputan jiandra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTJ} = \frac{\sum \text{RSTJ}}{\sum \text{STJ}} \times 100 \%$ <p>PSTJ = Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden RSTJ = Jumlah rumusan saran tindak kebijakan dan strategi nasional hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional di Kedeputan Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STJ = Jumlah saran tindak di Kedeputan Jiandra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Indikator Kinerja Utama

IKP3. Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden

Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional. 3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.
-----------------	--

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di kedeputian jiandra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $PKKJ = \frac{\sum RKKJ}{\sum KKJ} \times 100 \%$ <p>PKKJ = Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden RKKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Jiandra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKJ = Jumlah kajian kerjasama di kedeputian jiandra yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Penyedia Data	Kedeputian Pengkajian dan Penginderaan
Penanggungjawab	Deputi Pengkajian dan Penginderaan

MANUAL IKU DEPUTI SISTEM NASIONAL

SP2: Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (dinamis) berkaitan dengan permasalahan sistem nasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan sistem nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi froum II dibagi Naskah N-1 (dinamis) kedeputian sisnas yang di jadikan bahan uji materi froum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan sistem nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi froum II RN-2 = Naskah N-1 (dinamis) kedeputian sisnas yang di jadikan bahan uji materi froum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedeputian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

Indikator Kinerja Utama	
IKP2. Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTS} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTS = Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STS = jumlah saran tindak pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Sisnas yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedepatian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

Indikator Kinerja Utama	
IKP3. Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparat, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional.

	3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Sisnas yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKS} = \frac{\sum \text{RKKS}}{\sum \text{KKS}} \times 100 \%$ <p>PKKS = Persentase kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden RKKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Sisnas yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Sisnas yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Sistem Nasional
Penyedia Data	Kedeputian Sistem Nasional
Penanggungjawab	Deputi Sistem Nasional

MANUAL IKU DEPUTI POLITIK DAN STRATEGI

SP3: Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	<p>Rancangan kebijakan Politik dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (siklis dan dinamis) berkaitan dengan permasalahan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan.</p> <p>Kajian siklis adalah suatu telaahan yang diselenggarakan secara berlanjut sesuai periode waktu tertentu sebagai sumbangan bagi Pemerintah dalam menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka sedang, dalam dalam hal ini Deputi Politik dan Strategi menyusun kajian siklis dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategis Nasional (Stranas): Telaahan tentang kecenderungan lingkungan strategis, peluang dan kendala, prioritas sasaran, arah kebijakan dan perkiraan risiko pembangunan pada lima tahun yang akan datang. • Rencana Kontinjensi Nasional (Renkonnas): Telaahan tentang rencana kontinjensi menghadapi risiko pembangunan nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara. <p>Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan kebijakan politik dan strategi (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi froum II dibagi Naskah N-1 (siklis dan dinamis) Kedeputian Polstra yang di jadikan bahan uji materi froum II dikalikan seratus persen</p> $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan politik dan strategi (Naskah N-2) yang akan dihasilkan pada rapat uji materi froum II RN-2 = Naskah N-1 (siklis dan dinamis) Kedeputian Polstra yang di jadikan bahan uji materi froum II</p>
Target	80

Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama

IKP2. Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Jumlah rumusan saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak pemantauan kehidupan nasional di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama	
IKP3. Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan	
Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase perumusan perkiraan batas toleransi risiko pembangunan yang disiapkan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan RSTP = Jumlah rumusan saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak perkiraan batas toleransi risiko pembangunan di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

Indikator Kinerja Utama	
IKP4. Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	
Definisi	Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi

	<p>serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional.</p> <p>3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.</p>
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKJ} = \frac{\sum \text{RKKJ}}{\sum \text{KKJ}} \times 100 \%$ <p>PKKJ = Persentase kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden RKKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKJ = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Polstra yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Politik dan Strategi
Penyedia Data	Kedeputian Politik dan Strategi
Penanggungjawab	Deputi Politik dan Strategi

MANUAL IKU DEPUTI PENGEMBANGAN

SP4: Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP1. Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	
Definisi	Rancangan kebijakan dan strategi nasional merupakan hasil dari telaahan strategis (dinamis) berkaitan dengan permasalahan sistem nasional yang krusial mendesak yang disusun dalam bentuk analisis, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah yang dapat digunakan oleh Ketua Dewan dalam menentukan kebijakan. Kajian Dinamis: Diselenggarakan berdasarkan peristiwa/kejadian dan situasi/kondisi (isu nasional kritis mendesak) tertentu yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.
Formula perhitungan kinerja	Jumlah rumusan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi forum II dibagi Naskah N-1 (dinamis) ke deputian pengembangan yang di jadikan bahan uji materi forum II dikalikan seratus persen $\text{PRKN-2} = \frac{\sum \text{N-2}}{\sum \text{RN-2}} \times 100 \%$ <p>PRKN-2 = Persentase rancangan kebijakan pengembangan yang disiapkan untuk bahan prasidang N-2 = Jumlah rumusan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional (Naskah N-2) yang dihasilkan pada rapat uji materi forum II RN-2 = Naskah N-1 (dinamis) ke deputian pengembangan yang di jadikan bahan uji materi forum II</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama	
IKP2. Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden	
Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: 1. Perkiraan Cepat

	2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTS} = \frac{\sum \text{RSTS}}{\sum \text{STS}} \times 100 \%$ <p>PSTS = Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden RSTS = Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STS = jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional di Kedepatian Pengembangan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Pengembangan
Penyedia Data	Kedepatian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama

IKP3. Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden

Definisi	Saran tindak yang dimaksud adalah dalam lingkup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
-----------------	---

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PSTP} = \frac{\sum \text{RSTP}}{\sum \text{STP}} \times 100 \%$ <p>PSTP = Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden RSTP = Jumlah rumusan saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden STP = jumlah saran tindak hasil pengukuran kondisi pemantauan kehidupan nasional di Kedepatian Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	80
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedepatian Pengembangan
Penyedia Data	Kedepatian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKP4. Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden	
Definisi	<p>Kajian Kerjasama yang dimaksud adalah dalam lingkup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian Daerah (kajida) : kajian yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan aparatur, pakar, badan dan lembaga swadaya masyarakat daerah untuk mengatasi potensi permasalahan daerah. 2. Kajian Strategis Luar Negeri (kajilu) : Kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk pengembangan organisasi serta mencari potensi permasalahan atau hal lain yang dapat mempengaruhi keamanan nasional, regional dan internasional. 3. Semiloka : Membahas suatu masalah spesifik untuk mendapatkan informasi, sumbangan pemikiran, dan masukan lainnya yang menekankan pertukaran informasi untuk mendapat kesimpulan dan saran tindak tertentu.

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $\text{PKKS} = \frac{\sum \text{RKKS}}{\sum \text{KKS}} \times 100 \%$ <p>PKKS = Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden RKKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KKS = Jumlah kajian kerjasama di Kedeputian Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

Indikator Kinerja Utama

IKP5. Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan

Definisi	<p>Bela negara sesuai dengan RPJM 2020-2024 masuk kedalam Prioritas Nasional (PN) : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, telah ditentukan Program Prioritas (PP) 1 : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER, Kegiatan Prioritas (KP) 6 :Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, Proyek Prioritas (Pro PN) : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara. dan Peraturan Presiden Tentang kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Tahun 2020-2024 Wantannas diamanatkan untuk untuk melaksanakan kegiatan Bela negara untuk tahun 2020-2024 melalui Aksi nasional bela negara.</p>
-----------------	---

Formula perhitungan kinerja	<p>Jumlah Rancangan Kebijakan Bela Negara di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah kajian Bela Negara di Kedeputian Pengembangan yang dihasilkan dikali seratus persen</p> $PKBN = \frac{\sum RKBN}{\sum KBN} \times 100 \%$ <p>PKBN = Persentase rancangan kebijakan aksi bela negara untuk peminanaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan RKBN = Jumlah Rancangan Kebijakan Bela Negara di Kedeputian Pengembangan yang disetujui Sesjen untuk dikirim ke Presiden KBN = jumlah kajian Bela Negara di Kedeputian Pengembangan yang dihasilkan</p>
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Kedeputian Pengembangan
Penyedia Data	Kedeputian Pengembangan
Penanggungjawab	Deputi Pengembangan

MANUAL IKU STAFF AHLI

SP5: Meningkatnya kehandalan telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis

Indikator Kinerja Utama	
IKP3. Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	
Definisi	Telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi adalah dalam lingkup: 1. Perkiraan Cepat 2. Round Table Discussion 3. Forum General Discussion
Formula perhitungan kinerja	Jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang direkomendasikan kepada Sesjen untuk dikirim ke Presiden dibagi dengan jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang dihasilkan dikali seratus persen $\text{JTSR} = \frac{\sum \text{JTS}}{\sum \text{TS}} \times 100 \%$ JTS = Jumlah telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan JTS = Jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang direkomendasikan kepada Sesjen untuk dikirim ke Presiden TS = jumlah telaahan staff bidang keahlian tertentu yang dihasilkan
Target	85
Satuan pengukuran	Persentase
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Staff Ahli
Penyedia Data	Staff Ahli
Penanggungjawab	Staff Ahli

PERSPEKTIF: LEARNING AND GROWTH

MANUAL IKU DUKUNGAN MANAJEMEN

SS1: Terwujudnya Wantannas yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

Indikator Kinerja Utama	
IKU1. Indeks Reformasi Birokrasi	
Definisi	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Masing-masing komponen mempunyai nilai bobot. Adapun Komponen Pengungkit mencakup Area : a. Manajemen Perubahan (Bobot 5) b. Penataan Peraturan Peundang-undangan (Bobot 5) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (Bobot 6) d. Penataan Tata Laksana (Bobot 5) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (Bobot 15) f. Penguatan Akuntabilitas (Bobot 6) g. Penguatan Pengawasan (Bobot 12) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Bobot 6)
Formula perhitungan kinerja	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Target	BB
Satuan pengukuran	Peringkat
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Semua Kedeputian dan Semua Kebioaran
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKU2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Definisi	Evaluasi AKIP dilakukan dan dinilai oleh Kemenpan dan RB dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas atas outcome terhadap penggunaan anggaran. Penilaian dilakukan terhadap 5 komponen: Perencanaan Kinerja (35%), Pengukuran Kinerja (20%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%). Nilai akhir penjumlahan komponen menjadi nilai tingkat akuntabilitas instansi yang dinilai: AA (>85-100) adalah memuaskan A (>75-85) adalah sangat baik B (>65-75) adalah baik CC (>50-65) adalah Cukup (memadai) C (>30-50) adalah kurang D (0-30) adalah sangat kurang
Formula perhitungan kinerja	Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Target	75
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Biro POK dan Biro PSP
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas
Keterangan lainnya	-

Indikator Kinerja Utama	
IKU3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	
Definisi	Status Opini atas Laporan Keuangan hanya dikeluarkan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan sekali dalam setahun. Yang dilakukan oleh APIP dalam rangka menuju opini WTP adalah melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan internal berupa: Audit, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi serta Konsultasi. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada bidang-bidang yang sangat potensial dapat mempengaruhi Kinerja dan Opini, ataupun potensial menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan lebih diarahkan pada kegiatan pengawasan yang bersifat preventif (seperti probity audit) dan pendampingan/konsultasi.
Formula perhitungan kinerja	Opini atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK

Target	WTP
Satuan pengukuran	Peringkat
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Kemenpan dan RB
Penyedia Data	Biro POK
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas

Indikator Kinerja Utama

IKU4. Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan

Definisi	Sidang Dewan Ketahanan Nasional merupakan forum/rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Tahapan: persiapan sidang (inisiasi dan uji materi dalam forum deputi/uji pertama, forum sesjen/uji kedua dan forum pra sidang dewan/uji ketiga), pelaksanaan sidang dan pasca sidang.
Formula perhitungan kinerja	<p>Rumusan kebijakan yang disiapkan (untuk bahan prasidang/sidang dewan) dibagi dengan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikalikan seratus persen</p> $PRS = \frac{\sum RS}{\sum RH} \times 100 \%$ <p>PRS = persentase rumusan kebijakan yang disiapkan Sesjen Wantannas (untuk bahan prasidang/sidang dewan) RS = rekomnedasi rekomendasi kebijakan yang disiapkan Sesjen (untuk bahan prasidang/sidang dewan) RH = rumusan kebijakan yang di setuju sesjen pada forum uji I/II</p>
Target	2
Satuan pengukuran	Sidang
Polaritas	Maximize (Realisasi target semakin tinggi semakin baik)
Periode Laporan	Tahunan
Sumber data kinerja	Biro PSP
Penyedia Data	Kedeputian
Penanggungjawab	Sesjen Wantannas



PETA STRATEGIS

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

VISI

Dewan Ketahanan Nasional yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Perspektif Stakeholder

- Presiden/Ketua Dewan
- Wakil presiden
- Kementerian/lembaga
- Pemerintah Daerah
- Masyarakat

Perspektif Customer

- Sesjen Wantannas

Perspektif Learning & Growth

SS :

Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara

SP1

Terumuskannya rancangannya kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis

SP2

Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis

SP3

Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis

SP4

Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis

SP5

Meningkatnya kehandalan telaahan, saran dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis

SP6

Terkelolanya Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi

1. Perencanaan
2. Organisasi
3. Keuangan

SP7

Terkelolanya Layanan persidangan, sistem informasi dan Pengawasan internal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

1. Humas
2. Sistem Informasi
3. Pengawasan

SP8

Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi

1. SDM
2. Barang dan Jasa
3. Tata Usaha